

LAMPIRAN

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

Tahun Penilaian : 2022

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)						SIMPULAN KUOSIONER CEE
		R52	R53	R54	R55		Modus	
a	b	c						d
A.	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA							MEMADAI/ KURANG MEMADAI
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)	3	3	4	3		3	Memadai
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	2	3	3	4		3	Memadai
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	2	3	3	3		3	Memadai
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti	2	3	4	4		3	Memadai
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI							MEMADAI/ KURANG MEMADAI
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	3	3	4	4		3	Memadai
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	3	3	3	4		3	Memadai
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	3	3	4	3		3	Memadai
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	2	3	3	3		3	Memadai
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF							MEMADAI/ KURANG MEMADAI
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	2	3	3	3		3	Memadai
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	2	3	4	3		3	Memadai
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah	2	3	4	3		3	Memadai
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	2	3	3	3		3	Memadai
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	3	3	3	3		3	Memadai
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasional OPD	3	3	3	3		3	Memadai
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko	3	3	4	3		3	Memadai
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	3	3	4	3		3	Memadai
D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN							MEMADAI/ KURANG MEMADAI
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	3	3	4	3		3	Memadai
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	3	3	4		3	Memadai
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat <i>ad hoc</i> (sementara)	3	3	3	3		3	Memadai
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	3	4	3		3	Memadai

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)					SIMPULAN
		R52	R53	R54	R55	Modus	KUOSIONER CEE
a	b	c					d
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT						MEMADAI/ KURANG MEMADAI
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	3	3	4	3	3	Memadai
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	3	3	4	3	3	Memadai
3	Kewenangan direviu secara periodik	2	3	3	3	3	Memadai
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA						MEMADAI/ KURANG MEMADAI
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	4	3	4	4	3	Memadai
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	3	3	4	3	3	Memadai
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	4	3	4	3	3	Memadai
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko	4	3	4	3	3	Memadai
5	Adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	4	3	3	3	3	Memadai
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	4	3	3	3	3	Memadai
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	4	3	4	3	3	Memadai
G	PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF						MEMADAI/ KURANG MEMADAI
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	4	3	3	3	3	Memadai
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	4	3	3	3	3	Memadai
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	4	3	4	3	3	Memadai
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.	4	3	4	3	3	Memadai
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	4	3	3	3	3	Memadai
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT						MEMADAI/ KURANG MEMADAI
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	4	3	3	3	3	Memadai
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/peemriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	4	3	3	3	3	Memadai

Keterangan:

Kolom c diisi dengan jawaban responden

Ket Jawaban:

- 1 : Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun
- 2 : Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten
- 3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan
- 4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

pengendalian

Misal:

kesimpulan tiap pertanyaan :

"Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2 kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:

"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai"

R1, R2, R3, R4, R5, R6: Responden

- Perwakilan Masing-masing OPD (Eselon I dan II) untuk penilaian risiko strategis pemda

**Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern
di DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Nama Instansi : DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH		Tahun Penilaian : 2022	
No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	b	c	-
1	Hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Nomor 72C/LHP/XVIII.SMG/05/2021	Penagihan, Penyisihan dan Proses Penghapusan Piutang Lainnya Belum Memadai	
2	LHP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Nomor 700/2228/W.III/2021 Tanggal 29 September 2021	Surat pernyataan selesai TL dari inspektorat terkait LHP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Nomor 740/057/W.III/2019 Tanggal 16 Desember 2019 dengan temuan Belum ada kebijakan yang menetapkan jenis pangan lokal segar lain untuk penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal di Provinsi Jawa Tengah	

*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan, atau

Kolom d diisi dengan klasifikasi kelemahan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Nama Pemda : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jateng
Tahun Penilaian : 2022

No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai	-	Memadai	-	Memadai	
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai	-	Kurang memadai	-	Kurang memadai	-
3	Kepemimpinan yang kondusif	Memadai	-	Memadai	-	Memadai	
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang sesuai dengan kebutuhan	Memadai	-	Kurang memadai	-	Kurang memadai	-
5	Pendelegasian wewenang dan Tanggungjawab yg tepat	Memadai	-	Memadai	-	Memadai	
6	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan Sumber Daya Manusia	Memadai	-	Memadai	-	Memadai	
7	Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yg efektif	Memadai	-	Memadai	-	Memadai	
8	Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait	Memadai	-	Memadai	-	Memadai	

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi

Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi

Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan professional judgement untuk menyimpulkannya

Kolom h diisi dengan uraian kelemahan

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda	: Provinsi Jawa Tengah
Tahun Penilaian	: 2022
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2018-2023
Sumber Data	: Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023
Visi	: Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi
Misi Strategis RPJMD	1. Membangun masyarakat yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga negara NKRI 2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota 3. Memperkuat Kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran 4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda	Memperkuat Kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran
Tujuan Strategis RPJMD	1. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah semakin religius, toleran, dan guyup 2. Tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih 3. Kemiskinan di Jawa Tengah yang semakin menurun secara merata 4. Stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan eksklusif berbasis potensi unggulan 5. Sumber daya Jawa Tengah yang berkualitas dan berdaya saing 6. Sumber daya alam dan lingkungan hidup Jawa Tengah yang lestari dan berkelanjutan
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda	4. Stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan eksklusif berbasis potensi unggulan
Sasaran RPJMD	1. Terciptanya kohesi sosial masyarakat 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 3. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi manajemen pemerintahan 4. Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik 5. Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin pedesaan, dan kelompok rumah tangga desil terbawah 6. Menurunnya pengangguran terbuka 7. Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah disertai kesejahteraan petani dan peran investasi terhadap ekonomi daerah 8. Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas 9. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 10. Meningkatnya akses dan kualitas hidup perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender 11. Meningkatnya kualitas air, udara serta tutupan lahan 12. Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana

Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda	7. Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah disertai kesejahteraan petani dan peran investasi terhadap ekonomi daerah
IKU Sasaran RPJMD	1.1.1.1 Persentase konflik SARA 1.1.1.2 Indeks Toleransi 1.1.1.3 Persentase tindak pidana yang tertangani 2.1.1.1 Indeks birokrasi reformasi 2.1.1.2 Indeks kepuasan masyarakat 2.1.1.3 Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) 2.1.2.1 Nilai SAKIP 2.1.2.2 Indeks persepsi anti korupsi 2.1.2.3 Opini BPK 2.1.3.1 Nilai kematangan organisasi daerah 2.1.3.2 Indeks sistem Merit 3.1.1.1 Angka kemiskinan 3.1.1.2 Persentase penduduk miskin perkotaan 3.1.1.3 Persentase penduduk miskin perdesaan 3.1.1.4 Pengeluaran per kapita per bulan kelompok RT 20% berpenghasilan rendah 3.1.1.5 Angka partisipasi sekolah jenjang menengah kelompok RT 20% berpenghasilan rendah 3.1.1.6 Persentase kelompok RT 20% berpenghasilan terendah dengan keluhan kesehatan 3.1.2.1 Tingkat pengangguran terbuka 3.1.2.2 Persentase tenaga kerja kelompok RT 20% berpenghasilan terendah yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu 3.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi 3.2.1.2 Inflasi 3.2.1.3 PDRB per kapita 3.2.1.4 Indeks Williamson 3.2.1.5 Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan 3.2.1.6 Pertumbuhan sektor industri pengolahan 3.2.1.7 Pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa 3.2.1.8 Pertumbuhan kontribusi pariwisata pada PAD
Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda	3.2.2.1 Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan
Prioritas pembangunan dan program unggulan	1. Sekolah biaya pemerintah khusus untuk siswa miskin (SMA, SMK, SLB) 2. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni 3. Obligas Daerah, Kemudahan akses kredit UMKM 4. Menjaga harga komoditas dan asuransi harga panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan 5. Pengembangan transportasi masal revitalisasi jalur kereta dan jalur bandara serta pembangunan embung dan irigasi 6. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi
Urusan Pemerintahan Daerah	Pangan
Nama Dinas Terkait	Dinas Ketahanan Pangan
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan: Stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan eksklusif berbasis potensi unggulan Sasaran: Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah disertai kesejahteraan petani dan peran investasi terhadap ekonomi daerah IKU: Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Program Unggulan : Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan
	Provinsi Jawa Tengah, 2022 Gubernur Jawa Tengah

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	: Provinsi Jawa Tengah		
Tahun Penilaian	: 2022		
Periode yang dinilai	: 2022		
Urusan Pemerintahan	: Pangan		
OPD yang Dinilai	: Dinas Ketahanan Pangan		
Sumber Data	Dokumen Renstra		
Tujuan Strategis	Meningkatkan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah		
Sasaran Strategis	1. Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas		
IKU Renstra OPD		IKU	2023
	1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	88,80
	2	Angka Kecukupan Energi (kkal/kap/hr)	2100
Program	Peningkatan Ketahanan Pangan		
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Strategis : Meningkatkan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Sasaran Strategis: Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas IKU Strategis: Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Program: Peningkatan Ketahanan Pangan		
		Ungaran, April 2022 Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah <u>Ir. Dyah Lukisari, M.Si.</u> NIP. 19661016 199203 2 006	

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda : Provinsi Jawa Tengah	
Tahun Penilaian : 2022	
Periode yang dinilai : 2022	
Urusan Pemerintahan : Pangan	
OPD yang Dinilai : Dinas Ketahanan Pangan	
Sumber Data	Dokumen Renja Dinas Ketahanan Pangan 2022
Tujuan Strategis	Meningkatkan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
Program Dinas Kesehatan (Renja 2022) dan Kegiatan Utama	
1	Program Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
	1. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
	2. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
	3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok Dan Pangan Lainnya
	4. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi
	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi
	Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi
	1. Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
	2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
2	Program Pengawasan Keamanan Pangan
	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
	1. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota
	2. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi
	3. Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota
	4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan
	Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
	1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi
Keluaran/Hasil Kegiatan	
Program Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	
	1. Ketersediaan Energi Pangan beragam dan berkualitas
	3731 kkal/kap/hr
	2. CV harga pangan beras
	4,9
	3. Rasio cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan
	0,61
	4. Angka konsumsi beras
	92,3 kg/kap/th
	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
	a. Σ kelompok pangan pokok lokal substitusi beras yang di fasilitasi
	5 kelompok
	b. Jumlah informasi ketahanan pangan yang disediakan
	2 laporan
	c. % peningkatan volume bahan pangan yang didistribusikan untuk
	5%
	d. % peningkatan volume bahan pangan yang dilaksanakan untuk
	5%
	Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
	1). Σ bibit/benih pangan pokok lokal substitusi beras yang di fasilitasi
	5 paket
	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
	1). Analisa NBM dan analisa ketersediaan yang dilaksanakan
	2 laporan
	2). Σ informasi dan intervensi harga pangan strategis
	4 kali
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok Dan Pangan Lainnya

		1).Data pelaksanaan rantai pasok dan jaringan distribusi pangan melalui sistem logistik daerah	1 laporan
		2). Fasilitas Toko Tani Indonesia (TTI) Center	1 paket
		Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	
		1). \sum lokasi Pasar Mitra Tani yang difasilitasi	6 lokasi
		2). \sum Kelompok yang difasilitasi stimulan gabah pada Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	28 kelompok
		<i>Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi</i>	
		a. % peningkatan volume cadangan pangan	6 %
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi	
		1). \sum CPP yang disediakan (beras)	200 ton
		2). \sum Lumbung Pangan Masyarakat yang difasilitasi	28 kelompok
		<i>Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi</i>	
		a. Rasio konsumsi pangan lokal	0,14
		b. Konsumsi kelompok pangan buah dan sayur	86 kg/kap/th
		c. Konsumsi kelompok pangan hewani	33 kg/kap/th
		Sub Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	
		1). \sum kelompok pengembang pangan olahan lokal dan pangan pokok lokal di daerah rawan pangan yang difasilitasi	25 kelompok
		2). \sum Promosi dan edukasi Pangan B2SA yang dilaksanakan	3 kali
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	
		1). \sum kelompok pemanfaatan pekarangan di daerah rawan pangan yang di fasilitasi	30 kelompok
		2). Analisa PPH	1 laporan
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	
		1 % PSAT yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	80 %
		2 % rekomendasi Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan	80 %
		<i>Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	
		a. % jumlah objek pengawasan PSAT lintas kab/kota yang meningkat	10%
		b. Persentase PSAT teregistrasi di peredaran	22%
		c. Jumlah Informasi dan kerjasama keamanan pangan yang	1 laporan
		d. Tingkat kepuasan pelaku usaha yang memperoleh pelayanan	83
		e. Tingkat kepuasan pelaku usaha yang memperoleh pelayanan pengujian laboratorium	67,5
		Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	
		1). \sum Laporan Kajian Hasil Pengawasan Keamanan Pangan Segar	2 dokumen
		2). \sum sampel pangan segar yang diawasi	250 sampel
		3). \sum masyarakat yang teredukasi tentang mutu dan keamanan	225 orang
		Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	
		1). \sum kelompok/pelaku usaha yang dibina dalam penerapan	20 kelompok
		Sub Kegiatan Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	
		1). \sum Layanan sertifikasi dan registrasi	35 sertifikat
		Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	
		1). \sum sampel pangan yang diuji	60 sampel
		2).Dukungan fasilitasi sarana dan prasarana Laboratorium BPMKP	0
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	
		1. % penurunan daerah rawan pangan	1%
		<i>Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi</i>	
		% penanganan daerah rawan pangan	4,45%
		<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi</i>	
		\sum desa mandiri pangan yang difasilitasi	30 desa
		Peta SKPG dan atau FSVA	1 dokumen

Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	sda		
			<p>Ungaran, Februari 2022</p> <p>Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah</p> <p><u>Ir. Dyah Lukisari, M.Si.</u></p> <p>NIP. 19661016 199203 2 006</p>

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemda : Provinsi Jawa Tengah										
Nama OPD : Dinas Ketahanan Pangan										
Tahun Penilaian : 2022										
Periode yang dinilai : 2022										
Urusan Pemerintahan : Pangan										
No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah disertai kesejahteraan petani dan peran investasi terhadap ekonomi daerah	Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan								
	Program Unggulan :									
	Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan		Keterjangkauan pangan masyarakat tidak merata antar waktu dan antar wilayah	RSP.22.09.13.01	Kepala daerah	Perbedaan Panen antar waktu dan antar wilayah	Eksternal	UC	1. Akses Pangan Masyarakat Terganggu 2. Harga pangan fluktuatif	Masyarakat
			Rendahnya kemampuan menyerap hasil panen petani	RSP.22.09.13.02	Kepala daerah	Belum ada lembaga usaha yang menyerap panen secara optimal	Eksternal	UC	Harga pangan jatuh di tingkat petani	Masyarakat (produsen)
			Data tidak realtime	RSP.22.09.13.03	Kepala daerah	Belum ada lembaga yang ditunjuk sebagai operator SISLOGDA di Provinsi Jawa Tengah	Internal	C	Terhambatnya pelayanan kepada masyarakat	Masyarakat (Produsen, konsumen), stakeholder dalam SISLOGDA
			Tingginya ketergantungan konsumsi masyarakat terhadap padi-padian	RSP.22.09.13.04	Kepala daerah	Preferensi masyarakat terhadap pangan lokal masih rendah	Masyarakat Jawa Tengah	UC	Komoditas pangan lokal tidak berkembang secara optimal baik pada sisi budidaya maupun sisi bisnis olahan	masyarakat (petani, pelaku usaha olahan, konsumen)

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan Material

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Strategis OPD

Nama Pemda : Provinsi Jawa Tengah
 Nama OPD : Dinas Ketahanan Pangan
 Tahun Penilaian : 2022
 Periode yang dinilai : 2022
 Tujuan Strategis : Meningkatkan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
 Urusan Pemerintahan : Pangan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Tujuan:									
	Meningkatkan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Skor PPH	ketercapaian nilai komposisi pola pangan belum ideal pada seluruh kelompok pangan	RSO.22.09.13.01	Kepala Dinas	Rendahnya konsumsi kelompok pangan hewani, kacang-kacangan dan umbi-umbian	Eksternal	UC	Konsumsi pangan di dominasi kelompok padi-padian	Masyarakat Jawa Tengah
	Sasaran:									
	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas	Angka konsumsi energi	ketercapaian nilai komposisi pola pangan belum ideal pada seluruh kelompok pangan	RSO.22.09.13.01	Kepala Dinas	Rendahnya konsumsi kelompok pangan hewani, kacang-kacangan dan umbi-umbian	Eksternal	UC	Konsumsi pangan di dominasi kelompok padi-padian	Masyarakat Jawa Tengah
			Rendahnya angka konsumsi energi Jawa Tengah	RSO.22.09.13.02	Kepala Dinas	Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsumsi yang B2SA.	Eksternal	UC	Kecukupan energi di masyarakat tidak terpenuhi	Masyarakat Jawa Tengah
						Aksesibilitas terhadap pangan di masyarakat belum merata	Eksternal	UC		
	Program:									
	Program Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	ketersediaan energi pangan beragam dan berkualitas	Ketersediaan energi tidak beragam, masih didominasi oleh satu kelompok jenis pangan tertentu	RSO.22.09.13.03	Kepala Dinas	Kurangnya data dan informasi mengenai ketersediaan kelompok pangan lain	Eksternal	UC	Tidak tercapainya ketersediaan energi pangan yang beragam	Masyarakat Jawa Tengah
		coefisien variable (cv) harga pangan beras	Tidak terdistribusikannya bahan pangan dari produsen kepada konsumen	RSO.22.09.13.04	Kepala Dinas	Panjangnya rantai distribusi pangan	Eksternal	C/UC	Disparitas harga antara konsumen dan produsen	Masyarakat Jawa Tengah
		rasio cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan	Cadangan pangan tidak tersedia	RSO.22.09.13.05	Kepala Dinas	Keterbatasan anggaran pemerintah untuk penyediaan cadangan pangan.	Internal	C	Tidak tertanganinya rawan pangan	Masyarakat Jawa Tengah
		angka konsumsi beras	Angka konsumsi kelompok pangan padi-padian melebihi dari nilai konsumsi ideal	RSO.22.09.13.06	Kepala Dinas	Kurangnya edukasi pangan B2SA	Eksternal	UC	Diversifikasi pangan lokal belum dapat berkembang secara optimal	Masyarakat Jawa Tengah
						Rendahnya preferensi masyarakat terhadap pangan lokal	Eksternal	UC	Diversifikasi pangan lokal belum dapat berkembang secara optimal	Masyarakat Jawa Tengah
						Minimnya referensi olahan pangan lokal di masyarakat	Eksternal	UC	Diversifikasi pangan lokal belum dapat berkembang secara optimal	Masyarakat Jawa Tengah
						Harga pangan lokal belum dapat bersaing dengan harga pangan strategis	Eksternal	UC	Diversifikasi pangan lokal belum dapat berkembang secara optimal	Masyarakat Jawa Tengah

	Program Pengawasan Keamanan Pangan	persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	PSAT mengandung cemaran	RSO.22.09.13.07	Kepala Dinas	Kurangnya pengawasan, kurangnya pemahaman pelaku usaha PSAT terhadap keamanan pangan, kurangnya sosialisasi pada pelaku usaha	internal, eksternal		kesehatan masyarakat terganggu	Masyarakat Jawa Tengah
			Kualitas PSAT yang beredar masih buruk	RSO.22.09.13.08		Kurangnya pengawasan, kurangnya pemahaman pelaku usaha PSAT terhadap mutu pangan, kurangnya sosialisasi pada pelaku usaha	internal, eksternal		kesehatan masyarakat terganggu	Masyarakat Jawa Tengah
			Proses penanganan PSAT tidak sesuai standar	RSO.22.09.13.09		Kurangnya pengawasan, kurangnya pemahaman pelaku usaha PSAT terhadap standar keamanan pangan, kurangnya sosialisasi pada pelaku usaha	internal, eksternal		kesehatan masyarakat terganggu	Masyarakat Jawa Tengah
			PSAT belum memiliki izin edar/ nomor registrasi	RSO.22.09.13.10		Kurangnya pengawasan, kurangnya pemahaman pelaku usaha PSAT terhadap keamanan pangan, kurangnya sosialisasi pada pelaku usaha	internal, eksternal		kesehatan masyarakat terganggu	Masyarakat Jawa Tengah
			Masyarakat mengonsumsi pangan yang belum aman	RSO.22.09.13.11		Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi PSAT yang aman dan bermutu, kurangnya edukasi pangan aman dan bermutu ke masyarakat	eksternal, internal		kesehatan masyarakat terganggu	Masyarakat Jawa Tengah
		Presentase rekomendasi Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan	Belum maksimalnya rekomendasi jaminan mutu dan keamanan pangan	RSO.22.09.13.12	Kepala Dinas	Kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap jaminan mutu dan	Internal dan eksternal		kesehatan masyarakat terganggu	Masyarakat Jawa Tengah
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	persentase penurunan daerah rawan pangan	Belum Optimalnya intervensi pada daerah rawan pangan	RSO.22.09.13.13	Kepala Dinas	pemilihan stimulan untuk penanganan daerah rawan pangan.	Internal	U	Pendapatan perkapita rendah	Masyarakat Jawa Tengah

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urutan

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagai mana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis, sasaran, program, kegiatan

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko. Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan Material

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD

Nama Pemda : Provinsi Jawa Tengah
 Nama OPD : Dinas Ketahanan Pangan
 Tahun Penilaian : 2022
 Periode yang dinilai : 2022
 Tujuan Strategis : Meningkatkan ketahanan pangan
 Sasaran strategis OPD : Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas
 Urusan Pemerintahan : Pangan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
					Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat										
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan										
	Sub Kegiatan : Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan										
		Analisa NBM dan analisa ketersediaan yang dilaksanakan		Data komoditas pangan strategis yang dihasilkan kurang akurat	ROO.22.09.13.01	Kepala Dinas	Data yang diterima dari Dinas teknis terkait dan Instansi Pangan Kabupaten Kota belum lengkap	Eksternal	C	Rekomendasi kurang tepat	Instansi Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota
		Jumlah Informasi dan Intervensi Harga Pangan Strategis	Perencanaan/ pelaksanaan/ pembinaan/ pemantauan	Data harga pangan strategis kurang akurat.	ROO.22.09.13.02	Ka. Bid. Distribusi dan cad. Pangan	Keterlambatan dalam pemantauan di lapangan, ketelitian dalam input data.	Eksternal	C	Data tidak dapat dimanfaatkan untuk analisis dan bahan pengambilan kebijakan.	OPD
				Belum optimalnya intervensi harga pangan strategis	ROO.22.09.13.03	Ka. Bid. Distribusi dan cad. Pangan	Keterbatasan anggaran	Eksternal	UC	harga masih fluktuatif di beberapa daerah	Masyarakat

	Sub Kegiatan : Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal										
		Σ bibit/benih pangan pokok lokal substitusi beras yang di fasilitasi		Potensi pengembangan pangan lokal potensi daerah tidak optimal	ROO.22.09.13.04	Ka. Bid. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Pangan lokal kurang diminati oleh sebagian besar masyarakat	Eksternal	UC	1. Pemanfaatan pangan lokal tidak optimal 2. Upaya diversifikasi pangan sulit tercapai	Masyarakat/ OPD
	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya										
		Data pelaksanaan rantai pasok dan jaringan distribusi pangan melalui sistem logistik daerah	Perencanaan/ pelaksanaan / pembinaan	Aplikasi SISLOGDA error, belum running well	ROO.22.09.13.05	Ka. Bid. Distribusi dan cad. Pangan	Sistem dalam perbaikan	Eksternal	UC	Data tidak menggambarkan kondisi distribusi dan logistik pangan Provinsi Jawa Tengah secara utuh, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan	Masyarakat
				Tidak terserapnya produk petani	ROO.22.09.13.06	Ka. Bid. Distribusi dan cad. Pangan	Tidak ada pembeli/pasar yang menyerap produk petani	Eksternal	UC	Produsen mengalami kerugian	Produsen
		Fasilitasi Toko Tani Indonesia (TTI) Center	Perencanaan/ pelaksanaan / pembinaan	TTIC tidak dapat bersaing dengan pasar lainnya	ROO.22.09.13.07	Ka. Bid. Distribusi dan cad. Pangan	Lokasi tidak strategis, Keterbatasan anggaran, Sarana dan prasarana TTIC belum memadai	Eksternal dan Internal	C	TTIC tidak dapat beroperasi secara optimal	OPD dan Masyarakat
	Sub Kegiatan : Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan										
		Kelompok yang difasilitasi stimulan gabah pada Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	Perencanaan/ pelaksanaan / Evaluasi	Unit usaha distribusi pangan (sistem tunda jual) tidak berjalan	ROO.22.09.13.08	Ka. Bid. Distribusi dan cad. Pangan	Kurangnya pengetahuan dan keterampilan SDM dalam menjalankan usaha distribusi pangan; Kurangnya sarpras pendukung usaha distribusi pangan	Eksternal	UC	Usaha gapoktan tidak berkembang	Masyarakat
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi										
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi										
		Jumlah CPP yang Disediakan	Perencanaan/ pelaksanaan	Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang dikelola di bawah standar ketentuan yang berlaku	ROO.22.09.13.09	Ka. Bid. Distribusi dan cad. Pangan	Keterbatasan anggaran dan sarpras, kurangnya pengawasan.	Eksternal dan Internal	UC/C	Belum dapat mengintervensi seluruh kondisi rawan pangan transien di Jawa Tengah.	Masyarakat
		Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang Difasilitasi	Perencanaan/ pelaksanaan/ pembinaan	Tidak ada cadangan pangan di Lumbung Pangan Masyarakat	ROO.22.09.13.10	Ka. Bid. Distribusi dan cad. Pangan	Keterbatasan anggaran, SDM, dan sarpras.	Eksternal	UC	Tidak tertanganinya rawan pangan secara mandiri.	Masyarakat

	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi										
	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Σ kelompok pengembang pangan olahan lokal dan pangan pokok lokal di daerah rawan pangan yang difasilitasi	Perumusan Strategi Pengembangan Pangan Lokal Jawa Tengah	Data dan Informasi terkait potensi pangan lokal Jawa Tengah tidak akurat	ROO.22.09.13.11	Bidang KPP	tidak ada tim Pokja pengembangan pangan lokal yang melibatkan lintas OPD Provinsi dan OPD tingkat Kabupaten/Kota yang mampu urusan pangan		UC	Pengambilan Keputusan yang kurang tepat	Dishanpan
			Pelaksanaan Agenda Pengembangan Pangan Lokal Jawa Tengah	Agenda Intervensi pengembangan pangan lokal tidak efektif	ROO.22.09.13.12	Bidang KPP	Relevansi antara strategi intervensi pengembangan pangan lokal dengan kondisi di lapangan masih rendah		UC	Intervensi pengembangan pangan lokal belum optimal	Masyarakat Jawa Tengah
		Σ Promosi dan edukasi Pangan B2SA yang dilaksanakan	Perumusan strategi, edukasi dan promosi pangan lokal dan B2SA	keterjangkauan penyebaran informasi B2SA rendah	ROO.22.09.13.13	Bidang KPP	Minimnya pemanfaatan media dalam pelaksanaan edukasi dan promosi B2SA dan pangan lokal		C	Penyebaran informasi melalui promosi dan edukasi B2SA belum efektif	Masyarakat Jawa Tengah
			Pelaksanaan Edukasi B2SA di daerah Rawan Stunting	Agenda Edukasi B2SA tidak efektif	ROO.22.09.13.14	Bidang KPP	sinergi agenda intervensi terhadap permasalahan stunting masih rendah		UC	angka stunting di Jawa Tengah diatas standar WHO	Masyarakat Jawa Tengah
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Analisa PPH	Perumusan strategi intervensi perbaikan pola konsumsi masyarakat Jawa Tengah melalui OPP	Bantuan OPP tidak efektif	ROO.22.09.13.15	Bidang KPP	Belum adanya model kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan berdasarkan kesesuaian komoditas serta klimatologi masing-masing daerah		UC	Produktivitas OPP rendah	Masyarakat Jawa Tengah
			Pelaksanaan kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan	Kegiatan OPP tidak berkelanjutan	ROO.22.09.13.16	Bidang KPP	Penerima tidak memiliki dana operasional dalam menjalankan bantuan OPP		UC	Pola konsumsi masyarakat tidak mengalami perbaikan	Masyarakat Jawa Tengah

	Program Pengawasan Keamanan Pangan										
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota										
	Sub Kegiatan : Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Σ Laporan Kajian Hasil Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Pelaksanaan	Hasil kajian belum menggambarkan/ mewakili kondisi keamanan pangan di Jawa Tengah	ROO.22.09.13.17	Ka. Bid. Keamanan Pangan	Keterbatasan jumlah pengawas, keterbatasan anggaran pengawasan dan pengujian	internal	C	PSAT yang beredar di Jawa Tengah belum aman	Masyarakat
		Σ sampel pangan segar yang diawasi	Perencanaan	Terbatasnya jumlah sampel PSAT yang diuji	ROO.22.09.13.18	Ka. Bid. Keamanan Pangan	Keterbatasan anggaran Pengujian dan pengawasan	internal	C	PSAT yang beredar di Jawa Tengah belum aman	Masyarakat
			Pelaksanaan	Metode pengambilan sampel tidak tepat	ROO.22.09.13.19	Ka. Bid. Keamanan Pangan	petugas pengambil sampel tidak kompeten	internal	C	PSAT yang beredar di Jawa Tengah belum aman	Masyarakat
		Σ masyarakat yang teredukasi tentang mutu dan keamanan pangan	Pelaksanaan	masyarakat tidak memahami keamanan dan mutu pangan, kemampuan masyarakat beragam pangan	ROO.22.09.13.20	Ka. Bid. Keamanan Pangan	petugas dan narasumber tidak kompeten	internal, eksternal	C/UC	masyarakat mengkonsumsi pangan yang tidak aman dan bermutu	Masyarakat
	Sub Kegiatan : Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi	Σ kelompok/pelaku usaha yang dibina dalam penerapan higiene sanitasi	Pelaksanaan	kelompok/pelaku usaha tidak menerapkan higiene sanitasi	ROO.22.09.13.21	Ka. Bid. Keamanan Pangan	pelaku usaha tidak memahami higiene sanitasi, keterbatasan petugas	internal, eksternal	C/UC	PSAT yang beredar tercemar	Masyarakat
	Sub Kegiatan :Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Σ sampel pangan yang diuji	Pelaksanaan	Keterbatasan layanan pengujian mutu pangan	ROO.22.09.13.22	Ka. BPMKP	Keterbatasan ruang lingkup akreditasi pengujian, SDM dan sarana prasarana labolatorium	Internal		Pelayanan pengujian belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara mandiri oleh Laboratorium Pengujian Mutu Pangan	Masyarakat/Konsu men
		Dukungan fasilitasi sarana dan prasarana Laboraturium BPMKP	Pelaksanaan	Keterbatasan sarana dan prasarana pengujian mutu pangan	ROO.22.09.13.23	Ka. BPMKP	Belum dianggarkannya fasilitasi sarana dan prasarana laboratorium BPMKP sampai tahun 2022 (anggaran diusulkan tahun 2023)	Internal	-	Tidak optimalnya Laboratorium uji mutu dan keamanan pangan	Masyarakat/Konsu men

	Sub Kegiatan : Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Σ Layanan sertifikasi dan registrasi	Pelaksanaan	keterbatasan layanan sertifikasi dan registrasi	ROO.22.09.13.24	Ka. BPMKP	Kurangnya Kapasitas SDM yang kompeten /penataan personil	Internal		Belum optimalnya layanan registrasi dan Sertifikasi PSAT	Masyarakat/Konsu men
	PROGRAM KERAWANAN PANGAN										
	Penanganan kerawanan pangan kewenangana provinsi										
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	Jumlah desa mandiri pangan yg difasilitasi	Identiikasi wilayah, verifikasi penerima stimulan, sosialisasi kegiatan, pengadaan dan droping fasilitas DMP.	Fasilitasi penanganan pada daerah rawan pangan belum optimal	ROO.22.09.13.25	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Kurang tepatnya pemilihan komoditas stimulan dan Penerima fasilitasi stimulan tidak mampu mengelola bantuan stimulan.	Intenal	U	Fasilitasi penanganan daerah rawan pangan mengalami stagnan.	Masyarakat Jawa Tengah
		Peta SKPG dan atau FSVA	Penyusunan tim, kompilasi data, pengolahan data dan penyusunan peta SKPG dan atau FSVA.	Data dasar Peta SKPG dan atau FSVA yang dihasilkan kurang akurat	ROO.22.09.13.26	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Data yang diterima dari Dinas teknis terkait dan Instansi yang menanganai ketahanan Pangan Kabupaten/Kota belum lengkap.	Eksternal	UC	Terlambatnya penyusunan laporan Peta SKPG dan atau FSVA.	Instansi Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan

Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan

Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom f diisi dengan Kode risiko

Kolom g diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan Material

Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko

Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

**Kertas Kerja
Identifikasi Risiko Operasional OPD**

Nama Pemda : Provinsi Jawa Tengah
 Nama OPD : Dinas Ketahanan Pangan
 Tujuan Strategis : Meningkatkan ketahanan pangan
 Sasaran strategis OPD : Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas
 Urusan Pemerintahan : Pangan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		Controlled/ UnControlled	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode	Penanggungjawab Resiko	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
					Risiko						
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
	Kegiatan Administrasi Keuangan										
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	Pelaksanaan : Januari s.d Desember	Tidak akuratnya penyajian data awal	RPO.22.09.13.01	Ka. Subag. Keuangan	Data yg disampaikan tidak akurat	Internal	Controlled	Penyediaan gaji dan tunjangan tidak tepat waktu	OPD
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	Pelaksanaan : Januari s.d Desember	Tidak terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	RPO.22.09.13.02	Ka. Subag. Keuangan	Data yg disampaikan tidak akurat dan sering terjadi perubahan	Internal	Controlled	Menurunnya kinerja pelaksana kegiatan	OPD
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan	Pelaksanaan : Januari s.d Desember	Tidak akuratnya penyajian data awal penyusunan laporan dan verifikasi keuangan	RPO.22.09.13.03	Ka. Subag. Keuangan	Data yg disampaikan tidak akurat	Internal	Controlled	Penyajian laporan yg kurang akuntabel	OPD
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja										
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Perencanaan : Juni-Desember 2021	Ketidaksesuaian rincian RAB dengan pilihan indikator kegiatan/ sub kegiatan	RPO.22.09.13.04	Ka. Sub Bagian Program	Waktu penginputan aplikasi penganggaran terbatas/ singkat	Eksternal	Uncontrolled	Beberapa kegiatan/sub kegiatan perlu disesuaikan kembali pada anggaran perubahan	
				Tidak semua RAB barang/jasa yg dibutuhkan ada di ESHB	RPO.22.09.13.05	Ka. Sub Bagian Program	Terbatasnya barang/jasa dan speknya yang terdapat pada eSHB	Eksternal	Controlled	Beberapa barang/jasa terpaksa harus menyesuaikan spek yang ada di ESHB	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Pelaksanaan : Januari s.d Desember	Tidak tercapainya salah satu atau beberapa indikator tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan	RPO.22.09.13.06	Ka. Sub Bagian Program	kekurangcermatan/ pertimbangan dalam penentuan target	Internal	Controlled	nilai SAKIP OPD turun	Dishanpan prov Jateng
	Kegiatan Administrasi Umum										
1	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 12 Bulan	Pelaksanaan : Februari, Juli, dan November 2022	1. Terjadinya kerusakan jaringan listrik dan komponen listrik 2. Kabel listrik dimakan tikus	RPO.22.09.13.07	Ka. Subag. Umum dan Kepegawaian Dishanpan & BPMKP	1. Kondisi jaringan kelistrikan putus 2. Kabel-kabel listrik banyak yang berserakan di lantai	Internal	Controlled	1. Aktivitas kantor menjadi terhambat,pekerjaan terbengkalai/ terjadi keterlambatan 2. Dapat menyebabkan kebakaran	Dishanpan prov Jateng
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor 25 Unit	Pelaksanaan : April 2022	Terhambatnya kegiatan kantor	RPO.22.09.13.08	Ka. Subag. Umum dan Kepegawaian	Perlengkapan kantor sudah tidak tercukupi/tidak memadai dengan kegiatan organisasi	Internal	Controlled	Terjadinnya kekurangan peralatan saat kegiatan berlangsung/ tidak tercukupinya perlengkapan kantor	Dishanpan prov Jateng
		Jumlah unit penyediaan Peralatan Kantor 5 Unit	Pelaksanaan : Januari 2022 s/d Oktober 2022	Terhambatnya pekerjaan kantor	RPO.22.09.13.09	Ka. Subag. TU Balai	Peralatan dan perlengkapan kantor sudah tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan organisasi	Internal	Controlled	Terjadinya kekurangan peralatan dan perlengkapan kantor untuk di gunakan dalam kegiatan kantor sehari hari	BPMKP Dishanpan Prov Jateng
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga Perangkat Daerah 12 Bulan	Pelaksanaan : Januari s.d Desember 2022	Dalam pelaksanaan kegiatan kantor menjadi tidak nyaman	RPO.22.09.13.10	Ka. Subag. Umum dan Kepegawaian Dishanpan & BPMKP	Alat rumah tangga tidak tersedia	Internal	Controlled	Ruangan dan lingkungan kantor menjadi tidak terawat	Dishanpan prov Jateng

4	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitas kunjungan tamu 12 Bulan	Pelaksanaan : Januari s.d Desember 2022	Tamu yang datang dgn konfirmasi waktu yg terbatas tdk dpt ter spj konsumsinya	RPO.22.09.13.11	Ka. Subag. Umum dan Kepegawaian & BPKMP	Penyedia jasa konsumsi di aplikasi eblankon tidak segera merespon pesanan	Internal	Controlled	Byk waktu yg diperlukan untuk mencari penyedia yg cepat merespon pesanan di hari dan waktu yg segera	Dishanpan prov Jateng
5	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 12 Bulan	Pelaksanaan : Januari s.d Desember 2022	Kehadiran peserta rapat koordinasi terhambat dan kurang maksimal	RPO.22.09.13.12	Ka. Subag. Umum dan Kepegawaian	Anggaran belum tersedia	Internal	Controlled	Tidak adanya koordinasi	Dishanpan prov Jateng
		Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 12 Bulan	Pelaksanaan : Januari 2022 s.d Desember 2022	Tertundanya keputusan rapat	RPO.22.09.13.13	Ka. Subag. TU Balai	Adanya aturan social distancing akibat tingginya kasus covid 19	Internal	Controlled	Tidak terpenuhinya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	BPMKP Dishanpan Prov Jateng
6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya penatausahaan arsip 12 Bulan	Pelaksanaan : Januari 2022	1. Arsip dimakan rayap 2. Tulisan pada arsip hilang/ luntur	RPO.22.09.13.14	Ka. Subag. Umum dan Kepegawaian	1. Tidak adanya tempat penyimpanan khusus untuk arsip-arsip 2. Tinta yang digunakan kurang baik	Internal	Uncontrolled	Saat membutuhkan arsip-arsip menjadi sulit mencarinya	
7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah laporan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 1 Laporan	Pelaksanaan : Januari s.d Desember 2022	Gangguan eksternal dari penyedia jaringan internet	RPO.22.09.13.15	Ka. Subag. Umum dan Kepegawaian	Adanya kendala jaringan internet	Esternal	Uncontrolled	Tidak terlaksananya sistem pemerintah berbasis elektronik pada SKPD	
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggadaan kantor 12 Bulan	Pelaksanaan : Januari s.d Desember 2022	Sarpras pencetak tidak berfungsi maksimal	RPO.22.09.13.16	Ka. Subag. Umum dan Kepegawaian	Sarpras kurang perawatan	Internal	Controlled	Pendistribusian barang cetakan terhambat	
		Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan rumah tangga Perangkat Daerah	Pelaksanaan : Januari 2022 s.d Desember 2022	Ruangan dan lingkungan kantor tidak terawat	RPO.22.09.13.17	Ka. Subag. TU Balai	Alat rumah tangga tidak tersedia	Internal	Controlled	Dalam pelaksanaan kegiatan kantor menjadi tidak nyaman	BPMKP Dishanpan Prov Jateng
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan Perangkat Daerah 12 Bulan	Pelaksanaan: januari 2022	Terlambatnya penyediaan informasi tentang Dinas Ketahanan Pangan	RPO.22.09.13.18	Ka. Subag. Umum dan Kepegawaian	1. Masih mengandalkan informasi dari bahan bacaan cetak 2. Website Dishanpan lambat dalam mengupdate informasi 3. Belum memiliki akun resmi youtube	Internal	Uncontrolled	Informasi untuk masyarakat tidak terupdate dengan baik	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat Perangkat Daerah 12 Bulan	Pelaksanaan : Januari s.d Desember 2022	Distribusi surat menyurat masih membutuhkan waktu yang lama	RPO.22.09.13.19	Ka. Subag. Umum dan Kepegawaian	Masih menggunakan jasa pengirim surat untuk mendistribusikan surat-surat dinas	Eksternal	Uncontrolled	Informasi tidak tersampaikan dan menghambat pekerjaan	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, air dan listrik Perangkat Daerah 12 Bulan	Pelaksanaan : Januari s.d Desember 2022	Terjadi kenaikan tarif penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	RPO.22.09.13.20	Ka. Subag. Umum dan Kepegawaian	Biaya operasional pihak penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik tinggi	Eksternal	Controlled	Terhambatnya pekerjaan yang menggunakan sumber daya air dan listrik sehingga akan menurunkan kinerja petugas dan akan berdampak pada	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor 12 Bulan	Pelaksanaan : Januari s.d Desember 2022	Honor pegawai kontrak tidak dapat disesuaikan dengan kinerja	RPO.22.09.13.21	Ka. Subag. Umum dan Kepegawaian	SK pegawai kontrak ditetapkan setiap tahun dengan angka yang tetap disetiap bulannya	Internal	Controlled	Kinerja pegawai kontrak tidak terukur kompetensinya	
		Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 Bulan	Pelaksanaan : Januari 2022 s.d Desember 2022	Terjadinya tindak kriminalitas dan kebersihan lingkungan ter-bengkelai	RPO.22.09.13.22	Ka. Subag. TU Balai	Tidak adanya petugas penjagaan dan kebersihan lingkungan	Internal	Controlled	Banyak barang kantor yang hilang dan tidak terawat	BPMKP Dishanpan Prov Jateng
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										
13	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah bulan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah 12 Bulan	Pelaksanaan : Januari s.d Desember 2022	Kinerja JFT (Jabatan Fungsional Tertentu) penyetaraan harus mengimbangi kinerja JFT murni	RPO.22.09.13.23	Ka. Subag. Umum dan Kepegawaian	Adanya peraturan perundang-undangan terbaru terkait penyetaraan jabatan struktural dan fungsional	Internal	Uncontrolled	JFT penyetaraan kesulitan mengimbangi kinerja JFT murni	
14	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti DIKLAT/Workshop/Seminar 15 Orang	Pelaksanaan : Mei 2022	Tidak semua aparaturnya mengikuti kegiatan	RPO.22.09.13.24	Ka. Subag. Umum dan Kepegawaian	Adanya kegiatan lain yang bersamaan dengan kegiatan peningkatan kapasitas aparaturnya	Internal	Controlled	Pelaksanaan kegiatan tidak optimal	

	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										
15	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah tahun terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah 12 Bulan	Pelaksanaan : Oktober 2022 s/d September 2023	Tingginya risiko kerusakan dan kehilangan barang milik daerah	RPO.22.09.13.25	Ka. Subag. Umum dan Kepegawaian	Klaim yang ditolak oleh pihak penjamin (asuransi)	Internal	Controlled	Barang milik yang rusak/hilang tidak bisa diperbaiki atau diganti dengan yang baru	Dishanpan Prov Jateng
16	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan aset di SKPD 1 Laporan	Pelaksanaan : Maret s.d April 2022	Tanah tidak dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tupoksi	RPO.22.09.13.26	Ka. Subag. Umum dan Kepegawaian	Letak tanah jauh dari jangkauan SKPD	Internal	Controlled	Tanah mangkrak dikuasai pihak lain	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah 2 Unit	Pelaksanaan : Januari 2022 s.d Desember 2023	Gedung rusak dan membahayakan bagi pengguna dan pegawai	RPO.22.09.13.27	Ka. Subag. Umum dan Kepegawaian	Tidak dilakukan pemeliharaan rutin secara optimal	eksternal	Controlled	Mengganggu dan menghambat aktivitas pekerjaan kantor	Dishanpan Prov Jateng
		Jumlah Unit Gedung yang direhab 1 Unit	Pelaksanaan : Januari 2021 s.d Desember 2021	Kerusakan gedung semakin parah dan gedung tidak dapat digunakan	RPO.22.09.13.28	Ka. Subag. TU Balai	Gedung kantor tidak dilakukan pemeliharaan rutin	Internal	Controlled	Gedung kantor yang sudah tua usianya dan rusak membahayakan pegawai	BPMKP Dishanpan Prov Jateng
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2022	1. Pekerjaan terhambat karena komputer terkena virus 2. Tidak terawatnya peralatan dan perlengkapan kantor	RPO.22.09.13.29	Ka. Subag. Umum dan Kepegawaian	1. Komputer digunakan oleh banyak orang 2. terlambat pelaksanaannya	Internal	Controlled	Menghambat pelaksanaan kegiatan	Dishanpan Prov. Jateng
		Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana pendukung gedung kantor	Pelaksanaan : Januari 2021 s.d Desember 2021	Pekerjaan kantor terhambat karena sarana dan prasarana kantor banyak yang rusak dan tidak terawat	RPO.22.09.13.30	Ka. Subag. TU Balai	Anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor tidak tersedia dengan cukup	Internal	Controlled	Menghambat pelaksanaan kegiatan	BPMKP Dishanpan Prov Jateng
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	Pelaksanaan : Januari s/d Desember 2022	Kendaraan byk yg tidak layak jalan untuk operasional kegiatan	RPO.22.09.13.31	Ka. Subag. Umum dan Kepegawaian	Perawatan tidak dilakukan termasuk tidak terbayarnya pajak kendaraan	Internal	Controlled	Kendaraan operasional dinas tidak dapat digunakan untuk menunjang kegiatan dinas	Dishanpan Prov. Jateng

Keterangan Skor :

DAMPAK :

4 : Luar Biasa/ mengancam organisasi keseluruhan

3 : Besar/ Mengancam sebagian program

2 : Rendah/ Mengganggu sebagian kegiatan

1 : Tidak Signifikan/ Mengganggu Administrasi

KEMUNGKINAN :

4 : Hampir pasti terjadi/ Kemungkinan kejadian >80%

3 : Kemungkinan besar/ Kemungkinan kejadian >60% s.d. 80%

2 : Kemungkinan kecil/ Kemungkinan kejadian 30% s.d. 60%

1 : Hampir mustahil terjadi/ Kemungkinan kejadian <30%

Kertas Kerja
Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda		: Provinsi Jawa Tengah			
Tahun Penilaian		: 2022			
Tujuan Strategis		: Meningkatkan ketahanan pangan			
Urusan Pemerintahan		: Ketahanan Pangan			
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I Risiko Strategis Pemda					
1	Keterjangkauan pangan masyarakat tidak merata antar waktu dan antar wilayah	RSP.22.09.13.01	3	4	12
2	Rendahnya kemampuan menyerap hasil panen petani	RSP.22.09.13.02	3	3	9
3	Data tidak realtime	RSP.22.09.13.03	3	4	12
4	Tingginya ketergantungan konsumsi masyarakat terhadap padi-padian	RSP.22.09.13.04	3	4	12
II Risiko Strategis Dinas Ketahanan Pangan Prov. Jateng					
1	Tidak terdistribusikannya bahan pangan dari produsen kepada konsumen	RSO.22.09.13.04	3	3	9
2	Cadangan pangan tidak tersedia	RSO.22.09.13.05	4	2	8
3	ketercapaian nilai komposisi pola pangan belum ideal pada seluruh kelompok pangan	RSO.22.09.13.01	3	3	9
4	Rendahnya angka konsumsi energi Jawa Tengah	RSO.22.09.13.02	3	3	9
5	Angka konsumsi kelompok pangan padi-padian melebihi dari nilai konsumsi ideal	RSO.22.09.13.06	3	3	9
6	PSAT mengandung cemaran	RSO.22.09.13.07	3	2	6
7	Kualitas PSAT yang beredar masih buruk	RSO.22.09.13.08	3	3	9
8	Proses penanganan PSAT tidak sesuai standar	RSO.22.09.13.09	2	3	6
9	PSAT belum memiliki izin edar/ nomor registrasi	RSO.22.09.13.10	3	3	9
10	Masyarakat mengkonsumsi pangan yang belum aman	RSO.22.09.13.11	3	2	6
11	Belum Optimalnya intervensi pada daerah rawan pangan	RSO.22.09.13.13	2	2	4
III Risiko Operasional OPD Ketahanan Pangan					
Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat					
Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.					
1 Sub Kegiatan : Penyediaan Informasi Bahan Pangan dan Neraca Bahan Makanan.					
	Data komoditas pangan strategis yang dihasilkan kurang akurat	ROO.22.09.13.01	3	2	6
	Data harga pangan strategis kurang akurat.	ROO.22.09.13.02	3	3	9
	Belum optimalnya intervensi harga pangan strategis	ROO.22.09.13.03	2	4	8
2 Sub Kegiatan : Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					
	Potensi pengembangan pangan lokal potensi daerah tidak optimal	ROO.22.09.13.04	2	2	4
3 Sub Kegiatan : Koordinasi , Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya					
	Aplikasi SISLOGDA error, belum running well	ROO.22.09.13.05	3	3	9
	Tidak terserapnya produk petani	ROO.22.09.13.06	2	3	6
	TTIC tidak dapat bersaing dengan pasar lainnya	ROO.22.09.13.07	2	3	6
4 Sub Kegiatan : Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan					
	Unit usaha distribusi pangan (sistem tunda jual) tidak berjalan	ROO.22.09.13.08	2	3	6
Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi					
5 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi					
	Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang dikelola di bawah standar ketentuan yang berlaku	ROO.22.09.13.09	4	4	16
	Tidak ada cadangan pangan di Lumbung Pangan Masyarakat	ROO.22.09.13.10	4	2	8
Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi					
6 Sub Kegiatan : Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					
	Data dan Informasi terkait potensi pangan lokal Jawa Tengah tidak akurat	ROO.22.09.13.11	3	2	6
	Agenda Intervensi pengembangan pangan lokal tidak efektif	ROO.22.09.13.12	3	3	9
	keterjangkauan penyebaran informasi B2SA rendah	ROO.22.09.13.13	2	3	6
	Agenda Edukasi B2SA tidak efektif	ROO.22.09.13.14	3	3	9
7 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)					
	Bantuan OPP tidak efektif	ROO.22.09.13.15	3	3	9
	Kegiatan OPP tidak berkelanjutan	ROO.22.09.13.16	3	2	6

	Program Pengawasan Keamanan Pangan				
	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota				
8	Sub Kegiatan : Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota				
	Hasil kajian belum menggambarkan/ mewakili kondisi keamanan pangan di Jawa Tengah	ROO.22.09.13.17	2	2	4
	Terbatasnya jumlah sampel PSAT yang diuji	ROO.22.09.13.18	3	2	6
	Metode pengambilan sampel tidak tepat	ROO.22.09.13.19	3	2	6
	masyarakat tidak memahami keamanan dan mutu pangan, kemampuan masyarakat beragam	ROO.22.09.13.20	3	2	6
9	Sub Kegiatan : Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi				
	kelompok/pelaku usaha tidak menerapkan higiene sanitasi	ROO.22.09.13.21	3	3	9
10	Sub Kegiatan :Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan				
	Keterbatasan layanan pengujian mutu pangan	ROO.22.09.13.22	3	3	9
	Keterbatasan sarana dan prasarana pengujian mutu pangan	ROO.22.09.13.23	3	3	9
11	Sub Kegiatan : Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				
	keterbatasan layanan sertifikasi dan registrasi	ROO.22.09.13.24	3	3	9
	Program Kerawanan Pangan				
	Kegiatan Penanganan kerawanan pangan kewenangan provinsi				
12	Sub Kegiatan : Koordinasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi				
	Fasilitasi penanganan pada daerah rawan pangan belum optimal	ROO.22.09.13.25	2	2	4
	Data dasar Peta SKPG dan atau FSVA yang dihasilkan kurang akurat	ROO.22.09.13.26	3	2	6
	IV Risiko Penunjang Perangkat Daerah				
	Program Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah				
1	Kegiatan Administrasi Keuangan				
	Tidak akuratnya penyajian data awal	RPO.22.09.13.01	3	2	6
	Tidak terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	RPO.22.09.13.02	3	2	6
	Tidak akuratnya penyajian data awal penyusunan laporan dan verifikasi keuangan	RPO.22.09.13.03	3	2	6
2	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja				
	Ketidaksesuaian rincian RAB dengan pilihan indikator kegiatan/sub kegiatan	RPO.22.09.13.04	2	3	6
	Tidak semua RAB barang/jasa yang dibutuhkan ada di eSHB	RPO.22.09.13.05	2	3	6
	Tidak tercapainya salah satu atau beberapa indikator tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan	RPO.22.09.13.06	2	3	6
3	Kegiatan Administrasi Umum				
	1. Terjadinya kerusakan jaringan listrik dan komponen listrik	RPO.22.09.13.07	3	2	6
	2. Kabel listrik dimakan tikus				
	Terhambatnya kegiatan kantor	RPO.22.09.13.08	2	2	4
	Terhambatnya pekerjaan kantor	RPO.22.09.13.09	3	3	9
	Dalam pelaksanaan kegiatan kantor menjadi tidak nyaman	RPO.22.09.13.10	2	3	6
	Tamu yang datang dengan konfirmasi waktu yang terbatas tidakdapat ter spj konsumsinya	RPO.22.09.13.11	2	3	6
	Kehadiran peserta rapat koordinasi terhambat dan kurang maksimal	RPO.22.09.13.12	2	3	6
	Tertundanya keputusan rapat	RPO.22.09.13.13	2	3	6
	1. Arsip dimakan rayap	RPO.22.09.13.14	2	3	6
	2. Tulisan pada arsip hilang/luntur				
	Gangguan eksternal dari penyedia jaringan internet	RPO.22.09.13.15	2	3	6
	Sarpras pencetak tidak berfungsi maksimal	RPO.22.09.13.16	2	2	4
	Ruangan dan lingkungan kantor tidak terawat	RPO.22.09.13.17	2	3	6
	Terlambatnya penyediaan informasi tentang Dinas Ketahanan Pangan	RPO.22.09.13.18	2	3	6
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Distribusi surat menyurat masih membutuhkan waktu yang lama	RPO.22.09.13.19	2	3	6
	Terjadinya kenaikan tarif penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	RPO.22.09.13.20	3	3	9
	Honor pegawai kontrak tidak dapat disesuaikan dengan kinerja	RPO.22.09.13.21	2	2	4
	Terjadinya tindak kriminalitas dan kebersihan lingkungan terbungkalai	RPO.22.09.13.22	3	3	9
5	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	Kinerja JFT (Jabatan Fungsional Tertentu) penyetaraan harus mengimbangi kinerja JFT murni	RPO.22.09.13.23	2	3	6
	Tidak semua aparatur mengikuti kegiatan	RPO.22.09.13.24	2	2	4
6	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
	Tingginya risiko kerusakan dan kehilangan Barang Milik Daerah	RPO.22.09.13.25	2	2	4
	Tanah tidak dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tupoksi	RPO.22.09.13.26	2	2	4
7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Gedung rusak dan membahayakan bagi pengguna dan pegawai	RPO.22.09.13.27	2	2	4
	Kerusakan gedung semakin parah dan gedung tidak dapat digunakan	RPO.22.09.13.28	3	3	9
	1. Pekerjaan terhambat karena komputer terkena virus	RPO.22.09.13.29	2	3	6
	2. Tidak terawatnya peralatan dan perlengkapan kantor				
	Pekerjaan kantor terhambat karena sarana dan prasarana kantor banyak yang rusak dan tidak terawat	RPO.22.09.13.30	2	3	6
	Kendaraan banyak yang tidak layak jalan untuk operasional kegiatan	RPO.22.09.13.31	2	2	4

Keterangan Skor :

DAMPAK :

4 : Luar Biasa/ mengancam organisasi keseluruhan

3 : Besar/ Mengancam sebagian program

2 : Rendah/ Mengganggu sebagian kegiatan

1 : Tidak Signifikan/ Mengganggu Administrasi

KEMUNGKINAN :

4 : Hampir pasti terjadi/ Kemungkinan kejadian >80%

3 : Kemungkinan besar/ Kemungkinan kejadian >60% s.d 80%

2 : Kemungkinan kecil/ Kemungkinan kejadian 30% s.d. 60%

1 : Hampir mustahil terjadi/ Kemungkinan kejadian <30%

Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategi Urutan Pemerintahan		Provinsi Jawa Tengah 2021 Meningkatkan ketahanan pangan Ketahanan Pangan				
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I Risiko Strategi Pemda						
1	Keterjangkauan pangan masyarakat tidak merata antar waktu dan antar wilayah		12	Kepala daerah	1. Perbedaan Panen antar waktu dan antar wilayah	1. Akses Pangan Masyarakat Terganggu 2. Harga pangan fluktuatif
	Rendahnya kemampuan menyerap hasil panen petani		9	Kepala daerah	Belum ada lembaga usaha yang menyerap panen secara optimal	Harga pangan jatuh di tingkat petani
	Data tidak realtime		12	Kepala daerah	Belum ada lembaga yang ditunjuk sebagai operator SISLOGDA di Provinsi Jawa Tengah	Terhambatnya pelayanan kepada masyarakat
	Tingginya ketergantungan konsumsi masyarakat terhadap padi-padian		12	Kepala daerah	Preferensi masyarakat terhadap pangan lokal masih rendah	Komoditas pangan lokal tidak berkembang secara optimal baik pada sisi budidaya maupun sisi
II Risiko Strategi OPD Dinas Ketahanan Pangan						
	Tidak terdistribusikannya bahan pangan dari produsen kepada konsumen		9	Kepala Dinas	Panjangnya rantai distribusi pangan	Disparitas harga antara konsumen dan produsen
	Cadangan pangan tidak tersedia		8	Kepala Dinas	Keterbatasan anggaran pemerintah untuk penyediaan cadangan pangan.	Tidak tertanganinya rawan pangan
	ketercapaian nilai komposisi pola pangan belum ideal pada seluruh kelompok pangan		9	Kepala Dinas	Rendahnya konsumsi kelompok pangan hewani, kacang-kacangan dan umbi-umbian	Konsumsi pangan di dominasi kelompok padi-padian
	Rendahnya angka konsumsi energi Jawa Tengah		9	Kepala Dinas	Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsumsi yang B2SA.	Kecukupan energi di masyarakat tidak terpenuhi
	Angka konsumsi kelompok pangan padi-padian melahi dari nilai konsumsi ideal		9	Kepala Dinas	Aksesibilitas terhadap pangan di masyarakat belum merata	Kecukupan energi di masyarakat tidak terpenuhi
					Kurangnya edukasi pangan B2SA	Diversifikasi pangan lokal belum dapat berkembang secara optimal
					Rendahnya preferensi masyarakat terhadap pangan lokal	Diversifikasi pangan lokal belum dapat berkembang secara optimal
					Minimnya referensi olahan pangan lokal di masyarakat	Diversifikasi pangan lokal belum dapat berkembang secara optimal
					Harga pangan lokal belum dapat bersaing dengan harga pangan strategis	Diversifikasi pangan lokal belum dapat berkembang secara optimal
	PSAT mendukung emaran		6	Kepala Dinas	Kurangnya pengawasan, kurangnya pemahaman pelaku usaha PSAT terhadap keamanan pangan, kurangnya sosialisasi pada pelaku usaha	kesehatan masyarakat terganggu
	Kualitas PSAT yang beredar masih buruk		9	Kepala Dinas	Kurangnya pengawasan, kurangnya pemahaman pelaku usaha PSAT terhadap mutu pangan, kurangnya sosialisasi pada pelaku usaha	kesehatan masyarakat terganggu
	Proses penanganan PSAT tidak sesuai standar		6	Kepala Dinas	Kurangnya pengawasan, kurangnya pemahaman pelaku usaha PSAT terhadap standar keamanan pangan, kurangnya sosialisasi pada pelaku usaha	kesehatan masyarakat terganggu
	PSAT belum memiliki izin edar/ nomor registrasi		9	Kepala Dinas	Kurangnya pengawasan, kurangnya pemahaman pelaku usaha PSAT terhadap keamanan pangan, kurangnya sosialisasi pada pelaku usaha	kesehatan masyarakat terganggu
	Masyarakat mengonsumsi pangan yang belum aman		6	Kepala Dinas	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengonsumsi PSAT yang aman dan bermutu, kurangnya edukasi pangan aman dan bermutu ke masyarakat	kesehatan masyarakat terganggu

III	Risiko Operasional OPD Dinas Ketahanan Pangan					
	Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat					
	Penyediaan dan Penyaharan Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.					
	Sub Kegiatan : Penyediaan Informasi Bahan Pangan dan Neraca Bahan Makanan.					
	Data komoditas pangan strategis yang dihasilkan kurang akurat		6	Kepala Dinas	Data yang diterima dari Dinas teknis terkait dan Instansi Pangan Kabupaten Kota belum lengkap	Rekomendasi kurang tepat
	Data harga pangan strategis kurang akurat.		9	Ka. Bid. Distribusi dan cad. Pangan	Keterlambatan dalam pemantauan di lapangan, ketelitian dalam input data.	Data tidak dapat dimanfaatkan untuk analisis dan bahan pengambilan kebijakan.
	Belum optimalnya intervensi harga pangan strategis		8	Ka. Bid. Distribusi dan cad.	Keterbatasan anggaran	harga masih fluktuatif di beberapa daerah
	Sub Kegiatan : Koordinasi , Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya					
	Aplikasi SISLOGDA error, belum running well		9	Ka. Bid. Distribusi dan cad.	Sistem dalam perbaikan	Data tidak menggambarkan kondisi distribusi dan logistik pangan Provinsi Jawa Tengah secara utuh.
	Tidak terserapnya produk petani		6	Ka. Bid. Distribusi dan cad.	Tidak ada pembeli/pasar yang menyerap produk petani	Produsen mengalami kerugian
	TTIC tidak dapat bersaing dengan pasar lainnya		6	Ka. Bid. Distribusi dan cad.	Lokasi tidak strategis, Keterbatasan anggaran, Sarana dan prasarana TTIC belum memadai	TTIC tidak dapat beroperasi secara optimal
	Sub Kegiatan : Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan					
	Unit usaha distribusi pangan (sistem tunda jual) tidak berjalan		6	Ka. Bid. Distribusi dan cad. Pangan	Kurangnya pengetahuan dan keterampilan SDM dalam menjalankan usaha distribusi pangan; Kurangnya sarpras pendukung usaha distribusi pangan	Usaha gapoktan tidak berkembang
	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi					
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi					
	Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang dikelola di bawah standar ketentuan yang berlaku		16	Ka. Bid. Distribusi dan cad.	Keterbatasan anggaran dan sarpras, kurangnya pengawasan.	Belum dapat mengintervensi seluruh kondisi rawan pangan transien di Jawa Tengah.
	Tidak ada cadangan pangan di Lumbung Pangan Masyarakat		8	Ka. Bid. Distribusi dan cad.	Keterbatasan anggaran, SDM, dan sarpras.	Tidak tertangganya rawan pangan secara mandiri.
	Kegiatan : Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi					
	Sub Kegiatan : Promosi Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					
	Data dan Informasi terkait potensi pangan lokal Jawa Tengah tidak akurat		6	Bidang KPP	tidak ada tim Pokja pengembangan pangan lokal yang melibatkan lintas OPD Provinsi dan OPD tingkat Kabupaten/Kota yang mengampu urusan pangan	Pengambilan Keputusan yang kurang tepat
	Agenda Intervensi pengembangan pangan lokal tidak efektif		9	Bidang KPP	Relevansi antara strategi intervensi pengembangan pangan lokal dengan kondisi di lapangan masih rendah	Intervensi pengembangan pangan lokal belum optimal
	keterjangkauan penyebaran informasi B2SA rendah		6	Bidang KPP	Minimnya pemanfaatan media dalam pelaksanaan edukasi dan promosi B2SA dan pangan lokal	Penyebaran informasi melalui promosi dan edukasi B2SA belum efektif
	Agenda Edukasi B2SA tidak efektif		9	Bidang KPP	sinerg agenda intervensi terhadap permasalahan stunting masih rendah	angka stunting di Jawa Tengah diatas standar WHO
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SEA)					
	Bantuan OPP tidak efektif		9	Bidang KPP	Belum adanya model kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan berdasarkan kesesuaian komoditas serta klimatologi masing-masing daerah	Produktivitas OPP rendah
	Kegiatan OPP tidak berkelanjutan		6	Bidang KPP	Pemerita tidak memiliki dana operasional dalam menjalankan bantuan OPP	Pola konsumsi masyarakat tidak mengalami perbaikan
	Program Pengawasan Keamanan Pangan					
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
	Sub Kegiatan : Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota					
	Terbatasnya jumlah sampel PSAT yang diuji		6	Ka. Bid. Keamanan Pangan	Keterbatasan anggaran Pengujian dan pengawasan	PSAT yang beredar di Jawa Tengah belum aman
	Metode pengambilan sampel tidak tepat		6	Ka. Bid. Keamanan Pangan	petugas pengambil sampel tidak kompeten	PSAT yang beredar di Jawa Tengah belum aman
	masyarakat tidak memahami keamanan dan mutu pangan, kemampuan masyarakat beragam		6	Ka. Bid. Keamanan Pangan	petugas dan narasumber tidak kompeten	masyarakat mengkonsumsi pangan yang tidak aman dan bermutu
	Sub Kegiatan : Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi					
	belompok/pelaku usaha tidak menerapkan hygiene sanitasi		9	Ka. Bid. Keamanan Pangan	pelaku usaha tidak memahami hygiene sanitasi, keterbatasan petugas	PSAT yang beredar tercemar
	Sub Kegiatan :Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan					
	Keterbatasan layanan pengujian mutu pangan		9	Ka. BPMKP	Keterbatasan ruang lingkup akreditasi pengujian, SDM dan sarana prasarana laboratorium	Pelayanan pengujian belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara mandiri oleh Laboratorium Pengujian Mutu Pangan
	Keterbatasan sarana dan prasarana pengujian mutu pangan		9	Ka. BPMKP	Belum dianggarkannya fasilitas sarana dan prasarana laboratorium BPMKP sampai tahun 2022 (anggaran diusulkan tahun 2023)	Tidak optimalnya Laboratorium uji mutu dan keamanan pangan
	Sub Kegiatan : Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
	keterbatasan layanan sertifikasi dan registrasi		9	Ka. BPMKP	Kurangnya Kapasitas SDM yang kompeten /penataan personil	Belum optimalnya layanan registrasi dan Sertifikasi PSAT
	PROGRAM KERAWANAN PANGAN					
	Penanganan kerawanan pangan kewenangan provinsi					
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi					
	Data dasar Peta SKPG dan atau FSVA yang dihasilkan kurang akurat		6	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Data yang diterima dari Dinas teknis terkait dan Instansi yang menangani ketahanan Pangan Kabupaten/Kota belum lengkap.	Terlambatnya penyusunan laporan Peta SKPG dan atau FSVA.

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan/ RTP atas Kelemahan Lingkungan Pengendalian
(RTP atas CEE)**

Nama Pemerintah Daerah : Dinas Ketahanan Provinsi Jawa Tengah
Tahun Penilaian : 2021

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
a	b	c	d	e	f
I	Penegakan Integritas dan Nilai Etika				
-	-	-	-	-	-
II	Komitmen Terhadap Kompetensi				
1	Rencana kaderisasi staf yang kompeten untuk mendapat pelatihan terkait pengelolaan resiko	Pelatihan oleh pihak ketiga (BPSDMD/ BPKP Prov. Jateng/ Inspektorat) terkait pengelolaan	Inspektur/Sekretaris	Tahun 2022	
III	Kepemimpinan yang Kondusif				
-	-	-	-	-	-
IV	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan				
-	-	-	-	-	-
V	Pendelegasian Wewenang dan Tanggungjawab yang Tepat				
-	-	-	-	-	-
VI	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumberdaya Manusia				
-	-	-	-	-	-
VII	Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Efektif				
-	-	-	-	-	-
VIII	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait				
-	-	-	-	-	-

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai
Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan
Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian
Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP
Kolom f diisi dengan realisasi waktu penyelesaian RTP

**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)**

Nama Pemda : Provinsi Jawa Tengah
 Tahun Penilaian : 2022
 Tujuan Strategis : Meningkatkan ketahanan pangan
 Urusan Pemerintahan : Pangan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
IV	Risiko Penunjang Dinas Ketahanan Pangan						
	Kegiatan Administrasi Keuangan						
	Tidak akuratnya penyajian data awal	RPO.22.09.13.01	Menyediakan formulir / isian data	Sinkronisasi dan koordinasi antar bidang dan sekretariat	Menganalisa data yg telah tersaji untuk dijadikan data yg valid	Ka. Subag Keuangan	2022
	Tidak terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	RPO.22.09.13.02	Menyediakan formulir / isian data	Sinkronisasi dan koordinasi antar bidang dan sekretariat	Menganalisa data yg telah tersaji untuk dijadikan data yg valid	Ka. Subag Keuangan	2022
	Tidak akuratnya penyajian data awal penyusunan laporan dan verifikasi keuangan	RPO.22.09.13.03	Menyediakan formulir / isian data	Sinkronisasi dan koordinasi antar bidang dan sekretariat	Menganalisa data yg telah tersaji untuk dijadikan data yg valid	Ka. Subag Keuangan	2022
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
	-						
	Kegiatan Administrasi Umum						
1	1. Terjadinya kerusakan jaringan listrik dan komponen listrik 2. Kabel listrik dimakan tikus	RPO.22.09.13.07	kabel-kabel yang ada diberikan tempat khusus	Tidak adanya anggaran untuk membeli tempat khusus untuk kabel-kabel	Menganggarkan untuk pembelian tempat khusus kabel-kabel	Ka. Subag Umum dan Kepegawaian	Menyesuaikan jadwal perubahan anggaran
2	Terhambatnya pekerjaan kantor	RPO.22.09.13.09	Mengoptimalkan fungsi peralatan / perlengkapan kantor yang ada untuk sementara	membutuhkan tambahan anggaran	Mengusulkan tambahan anggaran pada perubahan anggaran	Kasubag TU BPMKP	Menyesuaikan jadwal perubahan anggaran
3	Dalam pelaksanaan kegiatan kantor menjadi tidak nyaman	RPO.22.09.13.10	Mengoptimalkan penyediaan peralatan rumah tangga yang ada untuk sementara	penambahan anggaran	Mengusulkan pengadaan kembali pada perubahan anggaran	Kasubag TU Dishanpan & BPMKP	Menyesuaikan jadwal perubahan anggaran
4	Tamu yang datang dgn konfirmasi waktu yg terbatas tdk dpt ter spj konsumsinya	RPO.22.09.13.11	Memesan penyediaan konsumsi dgn penyedia terdekat	Penyedia terkadang tidak sanggup untuk melayani pesanan yg mendadak	Mencari penyedia langganan yg dapat melayani pesanan dgn segera	Ka. Subag Umum dan Kepegawaian & BPMKP	2022
5	Kehadiran peserta rapat koordinasi terhambat dan kurang maksimal	RPO.22.09.13.12	Memaksimalkan komunikasi dengan peserta rapat	Tidak memiliki data informasi yang akurat terkait contact person peserta rapat	Meminta contact person peserta rapat jauh hari sebelum rapat dilaksanakan	Ka. Subag Umum dan Kepegawaian	2022
	Tertundanya keputusan rapat	RPO.22.09.13.13	Mengoptimalkan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah yang ada untuk sementara			Ka. Subag Umum dan Kepegawaian & BPMKP	
6	1. Arsip dimakan rayap 2. Tulisan pada arsip hilang/ luntur	RPO.22.09.13.14	Di belikan tempat khusus untuk arsip dan tinta yang lebih bagus	Anggaran yang dimiliki untuk membeli tempat khusus untuk arsip dan tinta yang lebih bagus kurang	Menganggarkan lebih tinggi untuk tempat khusus arsip dan tinta yang lebih bagus	Ka. Subag Umum dan Kepegawaian	Pada bulan Januari 2022
7	Gangguan eksternal dari penyedia jaringan internet	RPO.22.09.13.15	Melaporkan ke penyedia jasa internet atas kendala yang dialami	Tidak ada jawaban/ solusi dari pihak penyedia jasa internet atas kendala yang dialami	Mengganti penyedia jasa internet yang lebih baik lagi	Ka. Subag Umum dan Kepegawaian	2022
8	Sarpras pencetak tidak berfungsi maksimal	RPO.22.09.13.16	Perbaiki sarpras pencetak saat ada masalah		Perawatan berkala mesin pencetak	Ka. Subag Umum dan Kepegawaian	2022
	Ruangan dan lingkungan kantor menjadi tidak terawat	RPO.22.09.13.17	Pembelian/ penganggaraan alat rumah tangga di awal tahun anggaran	Kebutuhan alat rumah tangga terkadang mendadak	Perawatan berkala alat rumah tangga		
9	Terlambatnya penyediaan informasi tentang Dinas Ketahanan Pangan	RPO.22.09.13.18	mengoptimalkan bahan bacaan melalui media digital	SDM yang dimiliki belum memiliki kemampuan untuk mengelola informasi melalui media digital	Perlu diadakannya bimtek tentang digitalisasi media kepada SDM yang mengurus tentang kehumasan	Ka. Subag Umum dan Kepegawaian	2022

	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
10	Distribusi surat menyurat masih membutuhkan waktu yang lama	RPO.22.09.13.19	Menggunakan media digital untuk mempercepat pengiriman surat dinas	SDM yang dimiliki belum memiliki kemampuan untuk pengiriman surat melalui media digital	Diadakannya pelatihan terkait tentang surat menyurat elektronik kepada pegawai	Ka. Subag Umum dan Kepegawaian	2022
11	Terjadi kenaikan tarif penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	RPO.22.09.13.20	Mengoptimalkan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang ada untuk sementara	Penambahan tenaga cleaning service dan keamanan	Mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun berikutnya	Kasubag TU BPMKP	2023
12	Honor pegawai kontrak tidak dapat disesuaikan dengan kinerja	RPO.22.09.13.21	Pembinaan pegawai kontrak		Pembinaan pegawai kontrak dan menetapkan standar minimal kinerja pegawai kontrak	Ka. Subag Umum dan Kepegawaian	2022
	Terjadinya tindak kriminalitas dan kebersihan lingkungan ter-bengkelai	RPO.22.09.13.22	Mengoptimalkan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang ada untuk sementara	Penambahan tenaga cleaning service dan keamanan	Mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun berikutnya	Kasubag TU BPMKP	2023
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
13	Kinerja JFT (Jabatan Fungsional Tertentu) penyetaraan harus mengimbangi kinerja JFT murni	RPO.22.09.13.23	Diadakannya bimtek untuk JFT penyetaraan terkait penyetaraan jabatan	Kurangnya anggaran untuk melaksanakan bimtek	Menganggarkan kegiatan bimtek pembinaan SDM terkait penyetaraan jabatan	Ka. Subag Umum dan Kepegawaian	2022
14	Tidak semua aparatur mengikuti kegiatan	RPO.22.09.13.24	Semua ASN diwajibkan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensinya	ASN yang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan sudah pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan sejenis	Penyelenggara harus mencari kebutuhan pendidikan dan pelatihan agar ASN dapat mengikuti semua kegiatan	Ka. Subag Umum dan Kepegawaian	2022
	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
15	Tingginya risiko kerusakan dan kehilangan Barang Milik Daerah	RPO.22.09.13.27	Terjaminnya barang milik daerah akibat bencana alam dan kecelakaan	Apabila tidak adanya jaminan barang milik daerah maka kerusakan gedung kantor dan kendaraan dinas maka menghambat kinerja organisasi	Harus ada anggaran dan jaminan baik gedung kantor maupun kendaraan dinas	Ka. Subag Umum dan Kepegawaian	2022
16	Tanah tidak dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tupoksi	RPO.22.09.13.28	Tertatanya barang milik daerah	Kurang optimalnya penatausahaan barang milik daerah	Mengoptimalkan penatausahaan barang milik daerah dengan penambahan anggaran	Ka. Subag Umum dan Kepegawaian	Pada bulan maret 2022
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
17	Perbaikan gedung kantor dilakukan saat jam kantor		Kenyamanan dan keindahan gedung kantor untuk menunjang kinerja ASN	Mengganggu kenyamanan dan kinerja ASN serta membahayakan kinerja ASN	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor sehingga tujuan organisasi dapat tercapai	Ka. Subag Umum dan Kepegawaian	2022
	Kerusakan gedung semakin parah dan gedung tidak dapat digunakan	RPO.22.09.13.28	Mengoptimalkan pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya yang ada untuk sementara	penambahan anggaran	Mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun berikutnya	Kasubag TU BPMKP	2023
18	1. Pekerjaan terhambat karena komputer terkena virus 2. Tidak terawatnya peralatan dan perlengkapan kantor	RPO.22.09.13.29	Mengoptimalkalkan pemeliharaan perlengkapan kantor dan percepatan pengadaan suku cadang	koordinasi antara stakeholder	Penyusunan jadwal pemeliharaan perlengkapan gedug kantor dan mengoptimalkan petugas service	Ka. Subag Umum dan Kepegawaian	2022
	Pekerjaan kantor terhambat karena sarana dan prasarana kantor banyak yang rusak dan tidak terawat	RPO.22.09.13.30	Mengoptimalkan fungsi gedung kantor sebaik-baiknya untuk sementara	penambahan anggaran	Mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun berikutnya	Kasubag TU BPMKP	2023
19	Kendaraan byk yg tidak layak jalan untuk operasional kegiatan	RPO.22.09.13.31	Kendaraan byk yg tidak layak jalan untuk operasional kegiatan		Perawatan kendaraan dan cek surat2 secara berkala	Ka. Subag Umum dan Kepegawaian	2022

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.

Kolom e Diisi dengan alasan tidak efektif:

(1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan
(RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)

Nama Pemda : Provinsi Jawa Tengah
Tahun Penilaian : 2022
Tujuan Strategic : Meningkatkan ketahanan pangan
Urutan Pemerintahan : Pangan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindakan Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I Risiko Strategic Pemda							
1	Keterjangkauan pangan masyarakat tidak merata antar waktu dan antar wilayah	RSP.22.09.13.01	kegiatan PUPM, Fasilitas Tunda Jual/TTL, Stabilisasi Harga	Belum semua terfasilitasi untuk semua hasil pertanian (bahan pangan strategis)	sinergitas dengan kab/kota agar hasil panen dpt dijangkau seluruh jaring	Gubernur, Stakeholder terkait	2022
					Penyusunan Grand Desain pengelolaan Hulu - hilir komoditas pangan		
2	Rendahnya kemampuan menyerap hasil panen petani	RSP.22.09.13.02	kegiatan PUPM, LUPM, Pembiayaan Nafas Usaha Milik Petani (BUMP) dan lembaga usaha lainnya	Koordinasi dan jaringan pemasaran antar lembaga usaha belum optimal belum optimal	Pembiayaan dan pendampingan dari stakeholder terkait, pengembangan kemitraan	Gubernur, Stakeholder terkait	2022
3	Data tidak realtime	RSP.22.09.13.03	Pengembangan Aplikasi Siagla, Kerjasama dengan officer, Penyusunan Regulasi, Pemberdayaan Lembaga Ekonomi	Keterbatasan lembaga pendukung Siagla (Anggaran, SDM, sarana)	Penguatan lembaga pendukung Siagla	Gubernur, Stakeholder terkait	2022
4	Tingginya ketergantungan konsumsi masyarakat terhadap padi-padian	RSP.22.09.13.04	Edukasi B2SA, OPP, Promosi pangan lokal, Fasilitas alat pengolahan pangan lokal, Bantek pengolahan pangan lokal	Koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Kabupaten/Kota dan OPD lain belum optimal	Pembentukan Tim Pokja Pengembangan Pangan Lokal yang beranggotakan perangkat daerah terkait dan OPD Kabupaten/Kota yang menangani urusan pangan	Gubernur, Stakeholder terkait	2023
II Risiko Strategic OPD							
1	Tidak terdistribuskannya bahan pangan dari produsen kepada konsumen	RSD.22.09.13.04	kegiatan PUPM, TTL, Fasilitas Distribusi Pangan	Belum semua terfasilitasi untuk semua hasil pertanian (bahan pangan strategis)	sinergitas dengan kab/kota agar hasil panen dpt didistribusikan kepada konsumen sampai dengan titik wilayah	Kepala Dinas	2022
2	Cadangan pangan tidak tersedia	RSD.22.09.13.05	Mengalokasikan anggaran untuk penambahan volume pengadaan cadangan pangan	Keterbatasan Anggaran	Pengajuan tambahan anggaran, sinergitas dengan kabupaten/kota sehingga dapat tersedia cadangan pangan di kab/kota	Kepala Dinas	
3	Ketercapaian nilai komposisi pola pangan belum ideal pada seluruh kelompok pangan	RSD.22.09.13.01	Edukasi B2SA, OPP, Promosi pangan lokal, Fasilitas alat pengolahan pangan lokal, Bantek pengolahan pangan lokal	Belum adanya data potensi pangan lokal beserta harganya spesifik wilayah di Jawa Tengah	Melakukan pemetaan secara statistik dan integratif bersama dengan Dinas Pertanian dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Kepala Dinas	2023
4	Rendahnya angka konsumsi energi Jawa Tengah	RSD.22.09.13.02	Edukasi B2SA, OPP, Promosi pangan lokal, Fasilitas alat pengolahan pangan lokal, Bantek pengolahan pangan lokal	Belum adanya informasi pasar terkait pangan lokal yang dapat diabsorpsi oleh masyarakat secara luas	Optimalisasi pemanfaatan Siagla dalam penyampaian informasi ketersediaan dan harga pangan lokal di Jawa Tengah	Kepala Dinas	2023
5	Keterjangkauan penyebaran informasi B2SA rendah	RSD.22.09.13.01	Edukasi B2SA, OPP, Promosi pangan lokal, Fasilitas alat pengolahan pangan lokal, Bantek pengolahan pangan lokal	Belum adanya intervensi pengembangan pangan lokal secara terintegrasi dan berkesinambungan oleh seluruh stakeholder	Koordinasi Intensif dengan Disatrabun, Disanakrawan, Disalubhan, Diskepukman, Diskominfo, Disperindag, Dispermasindusdagri terkait perumusan strategi intervensi pengembangan	Kepala Dinas	2023

6	PSAT mengandung emaran	RSO.22.09.13.07	Pengawasan dan pembinaan	jangkauan pengawasan masih kurang, petugas kurang kompeten, pelaku usaha dan masyarakat kurang memperoleh sosialisasi	peningkatan kapasitas as pengawas melalui pelatihan pengawas secara online	Kepala DISHANNPAN	TW 4
7	Kualitas PSAT yang beredar masih banyak	RSO.22.09.13.08	Pengawasan dan pembinaan	jangkauan pengawasan masih kurang, petugas kurang kompeten, pelaku usaha dan masyarakat kurang memperoleh sosialisasi	pelatihan petugas pembina dengan materi pengujian mutu beras	Kepala DISHANNPAN	TW 1
					Pengawasan kerangka pencairan mutu beras pada label kemasan	Kepala DISHANNPAN	TW 2, TW 3
8	PSAT belum memiliki izin edar/ nomor registrasi	RSO.22.09.13.10	Pengawasan dan pembinaan	jangkauan pengawasan masih kurang, petugas kurang kompeten, pelaku usaha dan masyarakat kurang memperoleh sosialisasi	peningkatan kapasitas pengawas melalui pelatihan pengawas secara online	Kepala DISHANNPAN	TW 4
					Sosialisasi kepada pelaku usaha melalui leaflet berjudul "registrasi PRAT PDKN", postingan informasi keamanan pangan di media sosial Instagram Dishanpan Jateng	Kepala DISHANNPAN	TW 1
9	Masyarakat mengkonsumsi pangan yang belum aman	RSO.22.09.13.11	Sosialisasi	jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan terbatas	Sosialisasi kepada masyarakat melalui pertemuan pengrusakan pangan aman bernilai 5 kali	Kepala DISHANNPAN	Februari : 2 Maret : 2 Juni : 1
					Sosialisasi kepada masyarakat melalui leaflet, media audio, audio visual media sosial : postingan informasi keamanan pangan di media sosial Instagram Dishanpan Jateng	Kepala DISHANNPAN	Leader: TW4 Audio Visual TW3 Instagram : setiap bulan
III Risiko Operasional OPD Dinas Ketahanan Pangan							
Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat							
Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan Kebijakan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan							
Sub Kegiatan : Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan							
	Data komoditas pangan strategis yang dihasilkan kurang akurat	RSO.21.09.13.03	Koordinasi dengan Dinas terkait dan instansi pangan Kabupaten Kota	Sosialisasi penyusunan NIM dan ketersediaan komoditas pangan strategis	Melakukan himbangan teknis metode penghitungan penyusunan NIM dan NPS	Kepala Dinas	2022
	Data harga pangan strategis kurang akurat.		Koordinasi dan pembinaan kepada petugas enumerator	Gangguan pada sistem pelaporan Panel Harga, keterbatasan kemampuan SDM	Peningkatan kapasitas SDM, pemantauan kinerja secara berkala	Kalid Distribusi dan Cadangan Pangan	2022
	Belum optimalnya intervensi harga pangan strategis		Koordinasi dengan stakeholder/berjakban terkait harga	keterbatasan komunikasi dengan stakeholder	Dibentuk Tim intervensi harga	Kalid Distribusi dan Cadangan Pangan	2022
Sub Kegiatan : Koordinasi - Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya							
	Aplikasi SIREGODA error, belum running well		Koordinasi dengan OPD terkait, pengumpulan data dilakukan secara	Data Stoklogis kurang lengkap dan tidak real time	Pemutakhiran data secara berkala	Kalid Distribusi dan Cadangan Pangan	
	Tidak teresponnya produk petani		bermitra dengan offaker/lembaga usaha dalam menyerap produk petani	Keterbatasan kemampuan offaker/lembaga usaha dalam menyerap produk petani	Mengawal pemberitahuan lembaga usaha untuk menyerap produk petani	Kalid Distribusi dan Cadangan Pangan	
	TTIC tidak dapat bersaing dengan pasar lainnya		Pemerfaatan sarpras TTIC yang sudah tersedia, bermitra dengan produsen/distributor dalam penyediaan komoditas pangan	Keterbatasan anggaran, masih terbatasnya produsen/distributor yang bermitra	Peningkatan sarpras dan subsidi TTIC, meningkatkan kemitraan	Kalid Distribusi dan Cadangan Pangan	
Sub Kegiatan : Pengembangan Keterbacaan dan Peringan Distribusi Pangan							
	Unit usaha distribusi pangan (sistem rumah jual) tidak berjalan		Fasilitasi, Pendampingan, Penguatan Keterbacaan	Jumlah stimulus yang diberikan masih sangat kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan sehingga belum memberikan hasil yang signifikan	1) Menambah jumlah pelatihan, 2) Memberikan stimulus peralatan pendukung usaha distribusi pangan	Kalid Distribusi dan Cadangan Pangan	
Kegiatan Pengalokasian dan Keterbacaan Cadangan Pangan Provinsi							
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi							
	Cadangan Pangan Provinsi (CPP) yang dikelola di bawah standar ketentuan yang berlaku		Peningkatan CPPD Prov. melalui pengujian kapasitas (gabah, SDM, sarpras)	Jumlah CPPD belum sesuai ketentuan, sarpras yang tersedia tidak dapat berjalan	Pengadaan CPP sesuai dengan ketersediaan anggaran, perbaikan sarpras	Kepala OPD	2022
	Tidak ada cadangan pangan di Lumbung Pangan Masyarakat		Fasilitasi, Pendampingan, Penguatan Keterbacaan	Belum seluruh masyarakat paham tentang pentingnya cadangan pangan	Pembinaan dan Pendampingan Kelompok baik dalam hal teknis maupun administrasi	Kepala OPD	2022

Kegiatan Promosi Pencapaian Target Komunitas Pangan Perkota/Tahun Sesuai dengan Angka Kesehatan Gizi melalui Media Provinsi						
Sub Kegiatan : Promosi Pengantarbagaman Komunitas Pangan Berbasis Sumber Daya						
Agenda Intervensi pengembangan pangan lokal tidak efektif	Verifikasi calon Perorima, Monitoring dan Evaluasi	belum adanya Tim Pakja lintas OPD dan Kabupaten/Kota yang	Penyusunan Roadmap Pengembangan Pangan Lokal Jawa Tengah	Kepala Dinas	2023	
Agenda Edukasi B2B tidak efektif	Rapat pertemuan asasan edukasi	belum adanya kerjasama dengan stakeholder terkait utamanya media	Sinkronisasi Agenda Pengawasan steering dalam Roadmap pengembangan pangan lokal	Kepala Dinas	2023	
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Komunitas Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2B&A)						
Norman OPV tidak efektif	Verifikasi calon Perorima, Monitoring dan Evaluasi	belum optimalnya tim pendampingan dari Penyuluh	Penglokasian honorarium kepada pendamping lapangan/penyuluh yang telah memada dalam rangka pembinaan/pemberdayaan masyarakat perorima OPV	Kepala Dinas	2023	
Program Pengawasan Keamanan Pangan						
Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota						
Sub Kegiatan : Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota						
Tertawanya jumlah sampel PSAT yang diuji	Pengawasan PSAT di perorima	jangkauan pengawasan masih kurang	pengambilan sampel dengan metode multistage random sampling agar dapat mengrepresentasikan kondisi di Jawa Tengah	Kalid Keamanan Pangan	TW 1	
Metode pengambilan sampel tidak tepat	Pengawasan PSAT di perorima	jangkauan pengawasan masih kurang	Pelatihan Petugas Pengambil Contoh secara Online	Kalid Keamanan Pangan	TW 1	
masyarakat tidak memahami keamanan dan mutu pangan kemampuan masyarakat beragam	Sosialisasi	jumlah kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan terbatas	Sosialisasi kepada masyarakat melalui pertemuan pengesalan pangan aman bermutu 5 kali	Kalid Keamanan Pangan	Februari : 2 Maret : 2 Juni : 1	
			Sosialisasi kepada masyarakat melalui leaflet, media audio, audio visual media sosial : portingan informasi keamanan pangan di media sosial instagram @saharung_jateng	Kalid Keamanan Pangan	Leaflet: TW 4 Audio Visual TW 2 Instagram : setiap bulan	
Sub Kegiatan : Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi						
terlompok/pelaku usaha tidak menerapkan hygiene sanitasi	Pengawasan dan pembinaan terlampok/pelaku usaha	jangkauan pengawasan masih kurang, pelaku usaha kurang memperoleh sosialisasi, beragamnya kemampuan pelaku usaha menerapkan hygiene sanitasi	Sosiali kepada pelaku usaha, pelatihan hygiene sanitasi kepada pelaku usaha, pembinaan hygiene sanitasi kepada pelaku usaha	Kalid Keamanan Pangan	Pelatihan hygiene sanitasi TW 2, Sosialisasi pelaku usaha TW 4	
Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan						
Keterbatasan layanan pengujian mutu pangan	Pelayanan Pendaffaran pengujian mutu secara online	Keterbatasan anggaran dan ruang lingkup pengujian	Memambah ruang lingkup akreditasi pengujian dan sarana prasarana pengujian	Kepala BPMPKP	TW 1 s.d Tw.4	
Keterbatasan sarana dan prasarana pengujian mutu pangan	Facilitasi, laboratorium yang representatif	Keterbatasan sarana prasarana pengujian	Optimalisasi peralatan pengujian dan penambahan peralatan sesuai ruang lingkup yang terakreditasi SAN	Kepala BPMPKP	TW 4	
Sub Kegiatan : Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah						
keterbatasan layanan sertifikasi dan registrasi	Pelayanan Sertifikasi dan Registrasi secara OSS (online)	Belum semua terfasilitasi Registrasi dan sertifikasi	Pelatihan SDM kerjasama dengan pihak B	Kepala BPMPKP	Tw 1 s.d Tw.4	
Program Kerawanan Pangan						
Kegiatan Penangan kerawanan pangan kerewangana provinsi						
Sub Kegiatan : Koordinasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi						
Bimtek SDM Penyusunan SKPG dan/atau FSVA	Koordinasi dengan Dinas teknis terkait dan instansi pangan Kabupaten Kota	Sosialisasi penyusunan dan pengaloh data SKPG dan/atau FSVA	Bimtek Penyusunan SKPG dan/atau FSVA	Agensiun Mg ke IV 2022		

Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan risiko prioritas
Kolom c diisi dengan kode risiko
Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/ terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya, Contoh SOP Pemeliharaan: Gedung dibersihkan 2 kali sehari.
Kolom e diisi dengan alasan tidak efektif
(1) kubiakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangi risiko yang teridentifikasi,
Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan
Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggungjwab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian
Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda : Provinsi Jawa Tengah
Tahun Penilaian : 2022
Tujuan Strategis : Meningkatkan ketahanan pangan
Urusan Pemerintahan : Ketahanan Pangan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
	ATAS RISIKO PENUNJANG OPD						
	SUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN						
1	Menganalisa data yg telah tersaji untuk dijadikan data yg valid	Surat/Nota Dinas		Bidang dan Sekretariat	2021	Januari s/d Desember 2021	
2	Menganalisa data yg telah tersaji untuk dijadikan data yg valid						
3	Penyusunan jadwal pemeliharaan perlengkapan gedug kantor dan mengoptimalkan petugas service	Surat/form permintaan pemeliharaan perlengkapan gedung	Dishanpan Prov. Jateng	Petugas service perlengkapan gedung kantor	Januari s/d Desember 2021	Januari s/d Desember 2021	Menyesuaikan dengan kerusakan perlengkapan gedung kantor/untuk service dilakukan rutin.
4	Penyusunan jadwal Service Kendaraan Dinas secara berkala dan mengoptimalkan petugas service	Surat/Form permintaan Service/ Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas	Dishanpan Prov. Jateng	Dishanpan Prov. Jateng	Januari s/d Desember 2021	Januari s/d Desember 2021	Menyesuaikan dengan kerusakan perlengkapan Kendaraan Dinas/untuk service dilakukan rutin.
5	Memasukkan segala resiko pada pengadaan polis asuransi tahun 2021	Surat	Dishanpan Prov. Jateng	Pihak penjamin BMD (asuransi)	Oktober 2021	Oktober 2021	Menyesuaikan jadwal pengadaan polis asuransi
6	Mengusulkan pengadaan kembali pada perubahan anggaran	Nota dinas usulan perubahan anggaran	Dishanpan Prov. Jateng	Dishanpan Prov. Jateng	-	-	Menyesuaikan jadwal perubahan anggaran
7	Mengusulkan pengadaan kembali pada perubahan anggaran	Nota dinas usulan perubahan anggaran	Dishanpan Prov. Jateng	Dishanpan Prov. Jateng	-	-	Menyesuaikan jadwal perubahan anggaran
	TU BALAI BPKMP						
1	Mengusulkan pengadaan kembali pada perubahan anggaran	Nota dinas usulan perubahan anggaran	BPMKP Dishanpan Prov Jateng	Dishanpan Prov Jateng	Januari s/d Desember 2022	Januari s/d Desember 2022	Menyesuaikan jadwal perubahan anggaran
2	Mengusulkan pengadaan kembali pada perubahan anggaran	Nota dinas usulan perubahan anggaran	BPMKP Dishanpan Prov Jateng	Dishanpan Prov Jateng	Januari s/d Desember 2022	Januari s/d Desember 2022	Menyesuaikan jadwal perubahan anggaran
3	Mengusulkan pengadaan kembali pada perubahan anggaran	Nota dinas usulan perubahan anggaran	BPMKP Dishanpan Prov Jateng	Dishanpan Prov Jateng	Januari s/d Desember 2022	Januari s/d Desember 2022	Menyesuaikan jadwal perubahan anggaran

4	Mengusulkan pengadaan kembali pada perubahan anggaran	Nota dinas usulan perubahan anggaran	BPMKP Dishanpan Prov Jateng	Dishanpan Prov Jateng	Januari s/d Desember 2022	Januari s/d Desember 2022	bulan April 2022 s/d Desember 2022
5	Mengusulkan pengadaan kembali pada perubahan anggaran	Nota dinas usulan perubahan anggaran	BPMKP Dishanpan Prov Jateng	Dishanpan Prov Jateng	Januari s/d Desember 2022	Januari s/d Desember 2022	Menyesuaikan jadwal perubahan anggaran
6	Mengusulkan pengadaan kembali pada perubahan anggaran	Nota dinas usulan perubahan anggaran	BPMKP Dishanpan Prov Jateng	Dishanpan Prov Jateng	Januari s/d Desember 2022	Januari s/d Desember 2022	Menyesuaikan jadwal perubahan anggaran
7	Mengusulkan pada perubahan anggaran	Nota dinas usulan perubahan anggaran	BPMKP Dishanpan Prov Jateng	Dishanpan Prov Jateng	Januari s/d Desember 2022	Januari s/d Desember 2022	Menyesuaikan jadwal perubahan anggaran
8	Mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun berikutnya	Nota dinas usulan tambahan anggaran	BPMKP Dishanpan Prov Jateng	Dishanpan Prov Jateng	Januari s/d Desember 2022	Januari s/d Desember 2022	2023
9	Mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun berikutnya	Nota dinas usulan tambahan anggaran	BPMKP Dishanpan Prov Jateng	Dishanpan Prov Jateng	Januari s/d Desember 2022	Januari s/d Desember 2022	2023
10	Mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun berikutnya	Nota dinas usulan tambahan anggaran	BPMKP Dishanpan Prov Jateng	Dishanpan Prov Jateng	Januari s/d Desember 2022	Januari s/d Desember 2022	2023
	SUBBAG KEUANGAN						
1	Menganalisa data yg telah tersaji untuk dijadikan data yg valid	Surat/Nota Dinas	Dishanpan Prov. Jateng	Bidang dan Sekretariat	2022	Januari s/d Desember 2022	
2	Menganalisa data yg telah tersaji untuk dijadikan data yg valid	Surat/Nota Dinas	Dishanpan Prov. Jateng	Bidang dan Sekretariat	2022	Januari s/d Desember 2022	
3	Menganalisa data yg telah tersaji untuk dijadikan data yg valid	Surat/Nota Dinas	Dishanpan Prov. Jateng	Bidang dan Sekretariat	2022	Januari s/d Desember 2022	

Keterangan
Kolom a diisi dengan nomor urut
Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian
Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi
Kolom e diisi dengan Penerima Informasi
Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan
Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan
Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan pelaksanaan dan tindaklanjutnya, kegiatan dokumentasinya, serta keterangan lainnya.

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan (Tgl, Bln)	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
	RISIKO STRATEGIS PEMDA						
1	sinergitas degan kab/kota shg hasil panen dpt dijangkau seluruh jateng	surat/surat edaran	Dishanpan	Dinas Kab/kota	Ferbruari 2022	Februari 2022	Sinkronisasi Operasional Pelaksanaan Kegiatn Distribusi Pangan
2	Penyusunan Grand Desain pengelolaan Hulu - hilir komoditas pangan	nota dinas	Dinas terkait sektor pertanian	Sekda, Biro ISDA, Bappeda	Juni 2022		
3	Penguatan kelembagaan pemberdayaan menjadi kelembagaan ekonomi petani	surat	Dishanpan	Bappeda, Dinas Terkait, Dinas Kab/kota			
4	Pembinaan dan pendampingan dari stakeholder terkait, pengembangan kemitraan	Nota dinas/surat tugas/surat	Dishanpan, Biro Hukum, Dinas Kominfo	Masyarakat, asosiasi, pmda (stackholder terkait)			
5	Pembentukan Tim Pokja Pengembangan Pangan Lokal yang beranggotakan perangkat daerah terkait dan OPD Kabupaten/Kota yang menangani urusan pangan	Surat Edaran Gubernur	Dishanpan, Biro Hukum	OPD terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota	November, 2023		
	RISIKO STRATEGIS OPD						
1	sinergitas dengan kab/kota shg hasil panen dpt didistribusikan kepada konsumen sampai dengan lintas wilayah	Surat Kepala Dinas	DISHANPAN	Dinas Kabupaten/Kota	April 2022		
2	Pengajuan tambahan anggaran, sinergitas dengan kabupaten/kota sehingga dapat tersedia cadangan pangan di kab/kota	Nota Dinas/Surat Kepala Dinas	DISHANPAN	BAPPEDA Prov. Jateng, Dinas Kabupaten/Kota	April 2022		
3	Melakukan pemetaan secara holistik dan integratif bersama dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Surat Kepala Dinas	Dishanpan	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	November, 2022		
4	Optimalisasi pemanfaatan Sislogda dalam penyampaian informasi ketersediaan dan harga pangan lokal di Jawa Tengah	Surat Kepala Dinas	Dishanpan	OPD Terkait	November, 2022		
5	Koordinasi Intensif dengan Distanbun, Disnakeswan, Dinluthan, Dinkopumkm, Dinkominfo, Disperindag, Dispermasdesdukcapi terkait perumusan strategi intervensi pengembangan pangan lokal	Surat Kepala Dinas	Dishanpan	Distanbun, Disnakeswan, Dinluthan, Dinkopumkm, Dinkominfo, Disperindag, Dispermasdesdukcapi	November, 2022		
6	peningkatan kapasitas pengawas melalui pelatihan pengawas secara online	Surat undangan	DISHANPAN	Pelaku usaha, petugas dan masyarakat	TW 4		
7	pelatihan petugas pembina dengan materi pengujian mutu beras	Surat undangan	DISHANPAN	Pelaku usaha, petugas dan masyarakat	TW 1		
	Pengawsan kewajiban pencantuman mutu beras pada label kemasan				TW 2, TW 3		
8	peningkatan kapasitas pengawas melalui pelatihan pengawas secara online	Surat undangan, leaflet, instagram	DISHANPAN	Pelaku usaha, petugas	TW 4		
	Sosialisasi kepada pelaku usaha melalui leaflet berjudul "registrasi PSAT PDUK", postingan informasi keamanan pangan di media sosial instagram Dishanpan Jateng				TW 1		
9	Sosialisasi kepada masyarakat melalui pertemuan pengenalan pangan aman bermutu 5 kali	Surat undangan, leaflet, instagram	DISHANPAN	Masyarakat	Februari : 2 Maret : 2 Juni : 1		
	Sosialisasi kepada masyarakat melalui leaflet, media audio, audio visual media sosial : postingan informasi keamanan pangan di media sosial instagram Dishanpan Jateng				Leaflet: TW4 Audio Visual TW3 Instagram : setiap bulan		
	RISIKO OPERASIONAL OPD						
	ATAS RISIKO OPERASIONAL OPD						
	Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat						
	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan (Tgl, Bln)	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
	Sub Kegiatan : Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan						
	Melakukan bimbingan teknis metode penghitungan penyusunan NBM dan NPS	Surat/SK/Nota dinas/aplikasi	Distanbun, Disnakeswan. DKP, Disperindag, Bulog, BPS, Balai Karantina Pertanian, Dinas pangan Kabupaten Kota	Instani Pust, Provinsi, Kabupaten, kota	Juni 2022	Juni 2022	
	Peningkatan kapasitas petugas, pemantauan kinerja secara berkala	Surat/WAG	BAPANAS, Dishanpan	BAPANAS, petugas enumerator kabupaten/kota	Maret s.d. Desember 2022		
	Dibentuk Tim intervensi harga	Surat/SK	Dinas terkait	Dinas terkait	Juli 2022		
	Sub Kegiatan : Koordinasi , Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya						
	Pemutakhiran data secara berkala	Surat, rapat koordinasi, SK Gubernur, Peraturan Gubernur Jawa Tengah	Dinas teknis terkait: Distanbun; Disnakeswan, DKP, Disperindag, BPS, Badan Karantina	Dinas Ketahanan Pangan	12 bulan		
	Mengawal pembentukan lembaga usaha untuk menyerap produk petani	Surat, rapat koordinasi	DISHANPAN, Dinas kab/kota	Dinas terkait, Dinas kab/kota, gapoktan/lembaga usaha lainnya	12 bulan		
	Peningkatan sarpras dan publikasi TTIC, meningkatkan kemitraan	Nota Dinas/Surat/Medsos	DISHANPAN	Masyarakat konsumen	Mei 2022		
	Sub Kegiatan : Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan						
	1) Menambah jumlah pelatihan, 2) Memberikan stimulan peralatan pendukung usaha distribusi pangan	Surat, rapat koordinasi, Bimtek	OPD terkait di Kabupaten/ Kota, masyarakat penerima	Dinas Ketahanan Pangan	12 bulan		
	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi						
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi						
	Pengadaan CPP sesuai dengan ketersediaan anggaran, perbaikan sarpras	surat, koordinasi, website	DISHANPAN	Dinas terkait, Dinas kab/kota	Oktober 2022		
	Pembinaan dan Pendampingan Kelompok baik dalam hal teknis maupun administrasi	Surat, Bimtek, koordinasi, pendampingan	DISHANPAN	Dinas terkait, Dinas kab/kota, pengelola Lumbung Pangan Masyarakat	Maret - Desember 2022		
	Kegiatan Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi						
	Sub Kegiatan : Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						
	Penyusunan Roadmap Pengembangan Pangan Lokal Jawa Tengah	Peraturan Gubernur/Surat Keputusan Gubernur/ Surat Edaran Kepala Dinas	Dishanpan, Biro Hukum	OPD terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota	November, 2023		
	Sinkronisasi Agenda Penanganan stunting dalam Roadmap pengembangan pangan lokal	Peraturan Gubernur/Surat Keputusan Gubernur/ Surat Edaran Kepala Dinas	Dishanpan, Biro Hukum	OPD terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota	November, 2023		
	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)						
	Pengalokasian honorarium kepada pendamping lapangan/penyuluh yang lebih memadai dalam rangka pembinaan/pemberdayaan masyarakat penerima OPP	Pergub Rincian APBD	TAPD	Dishanpan	Desember, 2022		
	Program Pengawasan Keamanan Pangan						
	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota						
	Sub Kegiatan : Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota						
	pengambilan sampel dengan metode multistage random sampling agar dapat merepresentasikan kondisi di Jawa Tengah	Surat Undangan	Bidang Keamanan Pangan	Petugas dinas teknis, pelaku usaha	TW 1		
	Pelatihan Petugas Pengambil Contoh secara Online	pedoman teknis pengambilan sampel	Bidang Keamanan Pangan	Petugas dinas teknis, pelaku usaha	TW 1		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan (Tgl, Bln)	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
	Sosialisasi kepada masyarakat melalui pertemuan pengenalan pangan aman bermutu 5 kali	Surat undangan, leaflet, instagram	Bidang Keamanan Pangan	Masyarakat	TW 1, TW 3, TW 4		
	Sub Kegiatan : Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi						
	Sosilasi kepada pelaku usaha, pelatihan higiene sanitasi kepada pelaku usaha, pembinaan higiene sanitasi kepada pelaku usaha	Surat undangan	Bidang Keamanan Pangan	pelaku usaha	TW 2, TW 4		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan						
	Menambah ruang lingkup akreditasi pengujian dan sarana prasarana pengujian		BPMKP	pelaku usaha	2023		
	Optimalisasi peralatan pengujian dan penambahan peralatan sesuai ruang lingkup yang terakreditasi KAN		BPMKP	pelaku usaha	2023		
	Sub Kegiatan : Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						
	Pelatihan SDM kerjasama dengan pihak II	Surat Tugas/Nota Dinas	BPMKP	OPD Provinsi terkait/OPD Kab/Kota/LSO	TW II, TW III, TW IV		
	Program Kerawanan Pangan						
	Kegiatan Penanganan kerawanan pangan kewenangana provinsi						
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi						
	Bimtek SDM Penyusunan SKPG dan/atau FSVA.	surat/surat edaran/web	Tim Penyusun SKPG dan/atau FSVA dan Kab/Kota.	Dinas Kabupaten dan masyarakat Jawa Tengah	2023		

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian

Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi

Kolom e diisi dengan Penerima Informasi

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan

Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan pelaksanaan dan tindaklanjutnya, kegiatan dokumentasinya, serta keterangan lainnya.

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Pemda : Provinsi Jawa Tengah Tahun Penilaian : 2022 Tujuan Strategis : Meningkatkan ketahanan pangan Urusan Pemerintahan : Pangan										
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
IV	Risiko Penunjang Dinas					-				
	SUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN									
1	Tidak terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.	RPO.22.09.13.30	Januari s/d Desember 2021	Terkendala petugas service yang kadang bersamaan jadwal dengan service pihak lain dan pencarian suku cadang.	Alat dan perlengkapan gedung kantor tidak bisa digunakan secara optimal	-	Penyusunan jadwal pemeliharaan perlengkapan gedug kantor dan mengoptimalkan petugas service	Maksimal 1 minggu dari saat kerusakan perlengkapan gedung kantor	Maksimal 1 minggu dari saat kerusakan perlengkapan gedung kantor	
2	Tidak terpenuhinya suku cadang, service rutin/berkala kendaraan Dinas	RPO.22.09.13.31	Januari s/d Desember 2021	Terkendala petugas service yang kadang bersamaan jadwal dengan service pihak lain dan pencarian suku cadang.	Kendaraan Dinas tidak bisa digunakan secara optimal	-	Penyusunan jadwal service dan suku cadang kendaraan Dinas dan mengoptimalkan petugas service	Maksimal 7 (Tujuh) hari dari saat kerusakan kendaraan Dinas	Maksimal 7 (Tujuh) hari dari saat kerusakan kendaraan Dinas	
3	Tidak terjaminnya Barang Milik Daerah jika terjadi kerusakan atau kehilangan	RPO.22.09.13.25	Januari s/d Desember 2021	Klaim yang ditolak oleh pihak penjamin (asuransi)	Barang milik yang rusak/hilang tidak bisa diperbaiki atau diganti dengan yang baru	-	Memasukkan segala resiko pada pengadaan polis asuransi tahun 2021	Oktober 2021	Oktober 2021	
4	Tidak terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	RPO.22.09.13.29	Januari s/d Desember 2021	Refocusing anggaran	Dengan tidak tersedianya peralatan/perengkapan kantor dengan semestinya akan menurunkan kinerja petugas dan akan berdampak pada menurunnya pelayanan publik	-	Mengusulkan pengadaan kembali pada perubahan anggaran	Sesuai Jadwal perubahan anggaran	Menyesuaikan jadwal perubahan anggaran	
5	Tidak terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala	RPO.22.09.13.27	Januari s/d Desember 2021	Refocusing anggaran	kerusakan-kerusakan Gedung kantor tidak bisa diperbaiki sehingga tingkat kerusakannya akan semakin parah	-	Mengusulkan pengadaan kembali pada perubahan anggaran	Sesuai Jadwal perubahan anggaran	Menyesuaikan jadwal perubahan anggaran	

	TU BALAI BPMKP									
1	Belum Optimalnya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	RPO.22.09.13.07	Januari s/d Desember 2022	Refocusing anggaran	Dengan belum optimalnya penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan kantor dengan semestinya akan menurunkan kinerja petugas dan akan berdampak pada menurunnya pelayanan publik		Mengusulkan pengadaan kembali pada perubahan anggaran	Menyesuaikan jadwal perubahan anggaran	Menyesuaikan jadwal perubahan anggaran	
2	Belum optimalnya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	RPO.22.09.13.09	Januari s/d Desember 2022	Refocusing anggaran	Dengan belum optimalnya penyediaan peralatan/perengkapan kantor dengan semestinya akan menurunkan kinerja petugas dan akan berdampak pada menurunnya pelayanan publik		Mengusulkan pengadaan kembali pada perubahan anggaran	Menyesuaikan jadwal perubahan anggaran	Menyesuaikan jadwal perubahan anggaran	
3	Belum optimalnya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	RPO.22.09.13.16	Januari s/d Desember 2022	Refocusing anggaran	Dengan belum optimalnya penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan semestinya akan menurunkan kinerja petugas dan akan berdampak pada menurunnya pelayanan publik		Mengusulkan pengadaan kembali pada perubahan anggaran	Menyesuaikan jadwal perubahan anggaran	Menyesuaikan jadwal perubahan anggaran	
4	Belum optimalnya penyediaan fasilitas kunjungan tamu	RPO.22.09.13.11	Januari s/d Desember 2022	- pengadaan konsumsi tamu harus lewat aplikasi yang harus dilakukan beberapa hari sebelum pelaksana dan tidak tersedianya penyedia jasa catering yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan	Dengan belum optimalnya fasilitas kunjungan tamu dengan semestinya akan menurunkan kinerja petugas dan akan berdampak pada menurunnya pelayanan publik		Mengusulkan pengadaan kembali pada perubahan anggaran	bulan April 2022 s/d Desember 2022	bulan April 2022 s/d Desember 2022	
5	Belum optimalnya pelaksanaan rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	RPO.22.09.13.13	Januari s/d Desember 2022	Refocusing anggaran	Dengan belum optimalnya penyelenggaraan rapat rapat koordinasi dan konsultasi dengan semestinya akan menurunkan kinerja petugas dan akan berdampak pada menurunnya pelayanan publik		Mengusulkan pengadaan kembali pada perubahan anggaran	Menyesuaikan jadwal perubahan anggaran	Menyesuaikan jadwal perubahan anggaran	
6	Belum optimalnya penyediaan peralatan rumah tangga	RPO.22.09.13.08	Januari s/d Desember 2022	Refocusing anggaran	Dengan belum optimalnya penyediaan peralatan rumah tangga dengan semestinya akan menurunkan kinerja petugas dan akan berdampak pada menurunnya pelayanan publik	-	Mengusulkan pengadaan kembali pada perubahan anggaran	Menyesuaikan jadwal perubahan anggaran	Menyesuaikan jadwal perubahan anggaran	

7	Belum optimalnya penyediaan Jasa komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah	RPO.22.09.13.20	Januari s/d Desember 2022	Belum difungsikannya secara optimal seluruh alat alat laborato-rium yang ada karena masih menunggu pengadaan alat kelengkapannya .	Dengan belum optimalnya penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik dengan semestinya akan menurunkan kinerja petugas dan akan berdampak pada menurunnya pelayanan publik	-	Mengusulkan pada perubahan anggaran	Menyesuaikan jadwal perubahan anggaran	Menyesuaikan jadwal perubahan anggaran	
8	Belum optimalnya penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RPO.22.09.13.08	Januari s/d Desember 2022	areal perkantoran BPMKP yang luas dan ada di 2 lokasi tidak dapat terlayani dan diawasi oleh tenaga keamanan dan kebersihan yang minimal	Dengan belum optimalnya penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor dengan semestinya akan menurunkan kinerja petugas dan akan berdampak pada menurunnya pelayanan publik	-	Mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun berikutnya	2023	2023	
9	Belum optimalnya pemeliharaan gedung kantor dan Bangunan Lainnya	RPO.22.09.13.28	Januari s/d Desember 2022	Bangunan gedung kantor dan gedung lainnya yang dalam kondisi rusak berat membutuhkan anggaran yang sangat besar untuk memeliharanya	Dengan belum optimalnya pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya menyebabkan kerusakan-kerusakan Gedung kantor tidak bisa diperbaiki sehingga tingkat kerusakannya akan semakin parah		Mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun berikutnya	2023	2023\	
10	Belum optimalnya pemeliharaan rutin/berkala sarana Prasarana pendukung gedung kantor.	RPO.22.09.13.17	Januari s/d Desember 2022	Banyaknya sarana dan prasarana gedung kantor fsn bsgunsn lsinnys bsnyk ysg rusak dan membutuhkan biaya pemeliharaan tinggi	Dengan belum optimalnya pemeliharaan rutin berkala Sarana dan Prasarana gedung kantor tidak bisa digunakan secara optimal		Mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun berikutnya	2023	2023	
SUBBAG KEUANGAN										
1	Tidak akuratnya penyajian data awal	RPO.22.09.13.01	Januari s/d Desember 2021							
2	Tidak terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN	RPO.22.09.13.02	Januari s/d Desember 2021							
3	Tidak akuratnya penyajian data awal penyusunan laporan dan verifikasi keuangan	RPO.22.09.13.03	Januari s/d Desember 2021							
SUBBAG PROGRAM										
1	Ketidaksesuaian rincian RAB dengan pilihan indikator kegiatan/sub kegiatan	RPO.22.09.13.04	Januari s/d Desember 2021							
2	Tidak semua RAB barang/jasa yang dibutuhkan ada di eSHB	RPO.22.09.13.05	Januari s/d Desember 2021							
3	Tidak tercapainya salah satu atau beberapa indikator tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan	RPO.22.09.13.06	Januari s/d Desember 2021							
V	Masalah/Risiko Baru:									

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan

Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan

Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan

Kolom g diisi dengan keterangan tambahan

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama Pemda : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
Tahun Penilaian : 2022
Tujuan Strategis : Meningkatkan ketahanan pangan
Urusan Pemerintahan : Ketahanan Pangan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
	RISIKO STRATEGIS PEMDA					
1	sinergitas degan kab/kota shg hasil panen dpt dijangkau seluruh jateng	Surat/surat edaran/web	Kepala Dinas	12 bulan		
2	Penyusunan Grand Desain pengelolaan Hulu - hilir komoditas pangan					
3	Penguatan kelembagaan pemberdayaan menjadi kelembagaan ekonomi petani	Surat/surat edaran/web	Kepala Dinas	12 bulan		
	Pembinaan dan pendampingan dari stakeholder terkait, pengembangan kemitraan	Nota dinas/surat tugas/surat edaran/sk/web	Kepala Dinas	12 bulan		
	Pembentukan Tim Pokja Pengembangan Pangan Lokal yang beranggotakan perangkat daerah terkait dan OPD Kabupaten/Kota yang menangani urusan pangan	Surat Edaran Gubernur	Gubernur	November, 2022		

	RISIKO STRATEGIS OPD					
1	sinergitas dengan kab/kota shg hasil panen dpt didistribusikan kepada konsumen sampai dengan lintas wilayah	Surat Kepala Dinas	Kepala Dinas	April 2022		
2	Pengajuan tambahan anggaran, sinergitas dengan kabupaten/kota sehingga dapat tersedia cadangan pangan di kab/kota	Nota Dinas/Surat Kepala Dinas	Kepala Dinas	April 2022		
3	Melakukan pemetaan secara holistik dan integratif bersama dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Surat/surat edaran/web	Kepala Dinas	November, 2023		
4	Optimalisasi pemanfaatan Sislogda dalam penyampaian informasi ketersediaan dan harga pangan lokal di Jawa Tengah	Nota dinas/surat tugas/surat edaran/sk/web	Kepala Dinas	November, 2023		
5	Koordinasi Intensif dengan Distanbun, Disnakeswan, Dinluthan, Dinkopumkm, Dinkominfo, Disperindag, Dispermasdesdukcapil terkait perumusan strategi intervensi pengembangan pangan lokal	Surat/surat edaran/web	Kepala Dinas	Desember, 2022		

	RISIKO OPERASIONAL OPD					
	Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat					
	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan					
	Sub Kegiatan : Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan					
	Melakukan bimbingan teknis metode penghitungan penyusunan NBM dan NPS	Surat/SK/Nota dinas/aplikasi	Kepala Dinas	Juni 2022	Juni 2022	
1	Peningkatan kapasitas petugas, pemantauan kinerja secara berkala	Surat, rapat koordinasi	Kepala Dinas	12 bulan		
2	Dibentuk Tim intervensi harga	Surat, rapat koordinasi	Kepala Dinas	12 bulan		
	<i>Sub Kegiatan : Koordinasi , Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya</i>					

1	Pemutakhiran data secara berkala	Surat, rapat koordinasi, SK Gubernur, Peraturan Gubernur Jawa Tengah	Kepala Bidang	12 bulan		
2	Mengawal pembentukan lembaga usaha untuk menyerap produk petani	Surat, rapat koordinasi	Kepala Bidang	12 bulan		
	Peningkatan sarpras dan publikasi TTIC, meningkatkan kemitraan	Nota Dinas/Surat Kepala Dinas/Medsos	Kepala Bidang	Mei 2022		I
	Sub Kegiatan : Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan					
1	1) Menambah jumlah pelatihan, 2) Memberikan stimulan peralatan pendukung usaha distribusi pangan	Surat, rapat koordinasi	OPD terkait di Kabupaten / Kota	12 bulan		
	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi					

	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi					
1	Pengadaan CPP sesuai dengan ketersediaan anggaran, perbaikan sarpras	surat, koordinasi, website	Kepala Dinas	12 bulan		
2	Pembinaan dan Pendampingan Kelompok baik dalam hal teknis maupun administrasi	Surat, Bimtek, koordinasi, pendampingan	Kepala Dinas	12 bulan		
	Kegiatan : Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi					
	Sub Kegiatan : Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal					
	Penyusunan Roadmap Pengembangan Pangan Lokal Jawa Tengah	Surat/surat edaran/web	Kepala Dinas	November, 2023		
	Sinkronisasi Agenda Penanganan stunting dalam Roadmap pengembangan pangan lokal	Nota dinas/surat tugas/surat edaran/sk/web	Kepala Dinas	November, 2023		

	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)					
	Pengalokasian honorarium kepada pendamping lapangan/penyuluh yang lebih memadai dalam rangka pembinaan/pemberdayaan masyarakat penerima OPP	Surat/surat edaran/web	Kepala Dinas	Desember, 2022		
	Program Pengawasan Keamanan Pangan					
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
	Sub Kegiatan : Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota					
	pengambilan sampel dengan metode multistage random sampling agar dapat merepresentasikan kondisi di Jawa Tengah	Surat	Kepala Dinas	12 Bulan		

	Pelatihan Petugas Pengambil Contoh secara Online	Surat	Kepala Dinas	Maret		
	Sosialisasi kepada masyarakat melalui pertemuan pengenalan pangan aman bermutu 5 kali	Surat	Kepala Dinas	Maret, Juni		
	Sub Kegiatan : Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi					
	Sosilasi kepada pelaku usaha, pelatihan higiene sanitasi kepada pelaku usaha, pembinaan higiene sanitasi kepada pelaku usaha	Surat	Kepala Dinas	Sep-22		
	Sub Kegiatan :Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan					
	Menambah ruang lingkup akreditasi pengujian dan sarana prasarana pengujian	Nota Dinas/Surat Tugas	Kepala Dinas	12 bulan		
	Optimalisasi peralatan pengujian dan penambahan peralatan sesuai ruang lingkup yang terakreditasi KAN	Nota Dinas/Surat Tugas	Kepala Dinas	12 bulan		
	Sub Kegiatan : Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota					
	Pelatihan SDM kerjasama dengan pihak II	Nota Dinas/Surat Tugas/Web	Kepala Dinas	12 bulan		

	PROGRAM KERAWANAN PANGAN					
	Penanganan kerawanan pangan kewenangana provinsi					
	Sub Kegiatan : Koordinasi Penanganan					
	Bimtek SDM Penyusunan SKPG dan/atau	surat/surat edaran/web	Kepala Dinas	Juli 2022		

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan

Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan

Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan, seperti keterangan hasil kegiatan pemantauan, pelaksanaan monitoring, pendokumentasian, pendistribusian, dan keterangan lainnya.